



DATA

PILAH GENDER

KOTA BEKASI

TA. 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki akhir abad 20, tepatnya pada tanggal 4-15 September 1995, sebuah konferensi tingkat dunia tentang Perempuan ke IV telah terselenggara di Beijing, China. Konferensi yang bertema: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Seluruh rekomendasi dan hasil konferensi tertuang dalam Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform for Action*).

Indonesia, sebagai negara anggota PBB pun ikut berpartisipasi dalam konferensi tersebut dan mempunyai kewajiban moral melaksanakan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi tersebut. Kewajiban itu dibebankan kepada berbagai pihak baik Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi non-pemerintah, Kelompok Perempuan, Pelaku Pendidikan, Media Massa, Pihak Swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Secara Internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global PBB pada *Convention on the Elimination of all form of discrimination against women*, dimana berkewajiban untuk menghapus diskriminasi dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender baik yang bersifat sementara maupun berkesinambungan. Sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah di pemerintah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi

perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan.

Secara umum tujuan PUG memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Sejak diberlakukannya Inpres tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, Pemerintah mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam Misi 2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG. Adapun tujuan pelaksanaan PUG adalah agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok rentan dan termajinalisasi dalam pembangunan.

Implementasi penting dalam PUG adalah perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan kesenjangan gender dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, tetapi memastikan bagaimana agar perspektif gender dapat diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran.

Salah satu upaya yang harus segera diimplementasikan adalah penyediaan data. Upaya ini selaras dengan aksi Beijing yaitu aksi ke Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan khususnya poin 3 yaitu *“menyusun dan menyebarluaskan data yang telah dipilah-pilah menurut gender dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi”*.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG). Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan (iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data gender adalah data yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, serta disparitasnya, sehingga dapat dirumuskan isu gender. Melalui data gender ini selain dapat dirumuskan isu gender, dapat pula sebagai bahan pengambilan keputusan berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak mengamanatkan pentingnya data gender sebagai dasar pengambilan keputusan penting menyangkut kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Penyelenggaraan data gender disini merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan PUG yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Data terpilah menurut jenis kelamin bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Penggunaan data gender ini adalah untuk melakukan analisis gender, dan menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.

Tahapan penyusunan data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender.

Meskipun secara teoritis maupun yuridis formal diketahui manfaat dari data pilah gender ini, namun tidak semua Satuan Kerja Perangkat Daerah bergerak untuk menyediakan, menyajikan data pilah sebagai basis data dalam

merumuskan perencanaan penganggaran. Data terpilah dianggap rumit, karena tidak memiliki pedoman yang pasti maupun indikator yang jelas sehingga mudah bagi SKPD untuk mengisinya. Alasan lain yang sering dikemukakan oleh SKPD adalah beberapa kementerian belum banyak yang membutuhkan data pilah, sehingga walaupun sumber data tersedia, namun karena tidak diminta oleh kementerian yang diacu, data tersebut terabaikan dan tidak terolah.

Masih banyak SKPD yang belum menanggapi data pilah sebagai data urgen yang mampu menyajikan isu gender yang akurat. Pemerintah Kota Bekasi belum menyusun pedoman data pilah gender yang dapat digunakan oleh SKPD sebagai acuan dalam mengkompilasi data pilah sesuai dengan urusan. Hingga kini data pilah tersebut belum dapat dikompilasi secara utuh, karena SKPD belum secara konsisten melakukan pengumpulan dan serta kompilasi data. Untuk memudahkan pengisian data pilah, Bappeda menyusun sistem data pilah gender dengan harapan makin memudahkan bagi SKPD untuk mengisi setiap saat, sesuai dengan kebutuhan SKPD serta sesuai dengan indikator gender yang ditetapkan.

Sistem ini menggunakan pedoman data gender yang pernah disusun sebagai indikator, dipadukan dengan beberapa indikator sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Pendataan Dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Gender Dan Anak di Kota Bekasi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah dirubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. Tujuan

Tujuan Pendataan Dan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Gender Dan Anak di Kota Bekasi tahun 2015 adalah untuk meningkatkan aksesibilitas SKPD dalam mengumpulkan, melaporkan data pilah, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender.

D. Sistematika Buku Data Gender

Sistematika Buku Data Gender Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Bab I pendahuluan berisi latar belakang, ladsan hukum, tujuan dan sistematika buku
2. Bab II adalah metode berisi tata cara pengumpulan data gender.
3. BAB III Pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender Kota Bekasi berisi analisis capaian pembangunan responsif gender Kota Bekasi.
4. BAB IV Pemanfaatan Data Gender berisi penggambaran isu gender dan contoh-contoh dalam penggunaan data gender seperti penyusunan kegiatan dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP) atau dengan menggunakan Problem Based Approach (PROBA).
5. BAB V Penutup

BAB II

METODE PENYUSUNAN DATA GENDER

A. Data Gender Dalam Teori

1. Data Pembuka Wawasan

Data pembuka wawasan adalah data yang digunakan untuk menelusuri permasalahan yang terjadi. Dalam data mengandung permasalahan yang dapat dilihat dari perbedaan dari tahun ke tahun, perbedaan gender, wilayah, kondisi antar data bahkan menurut sumbernya. Data menjadi pembuka wawasan dan mendorong seseorang untuk menelusuri lebih jauh hubungan data satu dengan yang lain untuk mengungkapkan persoalan yang terjadi.

Kegunaan data gender ini adalah:

- a. Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda.
- b. Melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak.
- c. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- d. Sebagai input untuk melakukan analisis gender.
- e. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yg paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki
- f. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua yg bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta) dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat 'bercerita' banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya,

yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.¹

Terdapat 3 kelompok data yaitu data runtun waktu (**time series**), data silang (**cross section**), dan data panel (*pooled data*). Data sangat diperlukan dalam penelitian, maupun pengambilan keputusan. **Time series** merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. **Data time series** juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Karena diyakini pola perubahan **data runtun waktu** beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. **Data time series** juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih.

Data Silang (**cross section**) terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu, misalnya data pada IPG akan terdiri dari lama sekolah, jumlah melek huruf, pendapatan perkapita, dan harapan hidup. Data Panel (**pooled data**) adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu (**time series**) dan data silang (**cross section**). Karena itu **data panel** akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu.

Data belum dapat berbunyi jika belum terkumpul dengan baik. Ada beberapa pendekatan dalam pengumpulan data yaitu pendekatan pada proses (*process oriented*). Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*) dan pemodelan yang berorientasi pada proses (*process oriented modeling*). Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan ini memiliki langkah-langkah berikut :

- a. Mendefinisikan masalah
- b. Mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan
- c. Menjabarkan kebutuhan informasi
- d. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan
- e. Menentukan spesifikasi kebutuhan data

Data tidak dapat dibaca sebelum diolah. Proses pengolahan itulah yang disebut dengan informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data

¹ Fathansyah, Buku Teks Komputer Basis Data, Penerbit Informatika, Bandung. Hal 2

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi merupakan nilai yang telah memiliki makna bagi seseorang.

Dalam perspektif gender, data pembuka wawasan memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Untuk menyusun perencanaan responsif gender, ketersediaan data merupakan syarat utama guna melakukan analisis situasi gender. Data yang dibutuhkan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan gender.² Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda; melihat hasil intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat; serta dampak dari suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesenjangan gender.

Data pembuka wawasan dapat berupa: (1) data pilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.

2. Jenis Data Pembuka Wawasan

a. Data Terpilah

Data terpilah adalah : (1) data kuantitatif dan data kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan; (2) dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya : angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya; (3)

² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak

merupakan data tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan; (4) digunakan untuk melokalisasi atau mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan; dan (5) data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri, seperti :

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak, yang dimaksud dengan data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

b. Data Berdasarkan Insiden Khusus

Data berdasarkan insiden khusus adalah : (1) data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan. Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim di daerah terdampak; (2) data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan. Contoh : Jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin; dan (3) data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan. Contoh : jumlah kasus HIV/AIDS ibu dan anak.

3. Data Gender dan Kerangka Analisis Gender

Terdapat lima jenis analisis gender yaitu : (1) model Harvard, (2) Model Moser, (3) Analisis SWOT, (4) Gender Analysis Pathway (GAP) dan Model Problem Based Approach (PROBA). Kelima model analisis ini basisnya adalah data gender. Dalam Model Harvard dan Moser, penggunaan data gender berbasis keluarga dengan eksplorasi pada data kegiatan produktif, reproduktif, sosial, keagamaan dan bahkan hingga kegiatan politik. Informasi yang akan disajikan berupa gambaran kesenjangan keluarga dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Penggunaan analisis SWOT dalam analisis kesenjangan gender adalah pemanfaatan data gender untuk mengeksplorasi kondisi internal dan eksternal dari suatu sumberdaya yang ada. Misalnya data kemiskinan

dianalisis dengan perspektif SWOT untuk digali tentang kelebihan dan kekurangan orang miskin, peluang dan tantangan yang terjadi sehingga dapat dihasilkan intervensi program dan kegiatan yang selaras.

Dalam Gender Analysis Pathway (GAP) maupun Problem Based Approach (PROBA), diperlukan data dan informasi yang dapat menggambarkan adanya situasi dan kondisi berkaitan dengan faktor-faktor kesenjangan, meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan bagi perencana menetapkan rencana aksi sesuai dengan kondisi yang ada. Melalui klasifikasi ini perencana akan mampu menjaga konsistensi antara data yang tersedia, isu gender hingga sampai ke penetapan rencana aksi.

4. Integrasi Data Gender Dalam Perencanaan Penganggaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PPRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula

penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak pasal 1 mengungkapkan bahwa penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, serta berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.³

Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang

³ NSPK Data Gender dan Anak, 2009

terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.⁴

Beberapa jenis data yang diatur dalam peraturan ini selain data terpilah, juga data anak. Data terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan. Selain itu terdapat data lain yaitu data sektoral dan data khusus.

Data sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Data Khusus adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.⁵

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan Anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak;
- b. Dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta

⁴ opcit, 2009

⁵ Opcit, 2009

- dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
 - d. Relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/ kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. Berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

B. Pengembangan Sistem Informasi Data Gender

Konsep dasar sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (hanif, 2007). Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya.

Pengembangan sistem informasi dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya dan dapat memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

Pengertian Sistem Informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Henry Lucas, Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari

prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam.⁶ Menurut James A. O'Brien, "Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi".⁷ Menurut Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. (2007:42) sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.⁸

Sistem Informasi Berbasis Web adalah sistem komputer ditambah internet. Sistem komputer merupakan gabungan dari software, hardware dan brainware. Software mengacu pada perangkat lunak atau aplikasi komputer atau program komputer yang terpasang pada sebuah komputer. Sedangkan hardware diartikan dengan perangkat keras komputer yang dapat disentuh dan dilihat. *Hardware* ini contohnya CPU, processor, layar monitor, mouse, printer, modem, harddisk, keping DVD dan lain sebagainya. Manusia yang menjalankan atau melakukan pekerjaan dengan computer sering kita sebut dengan *brainware*. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem komputer. Tujuannya adalah mengelola dan mengolah data untuk menghasilkan informasi.

Sistem informasi ini adalah sebuah sistem komputer yang bertugas mengolah data untuk menghasilkan informasi, yang dilengkapi dengan alat komunikasi yang dipergunakan untuk saling tukar informasi atau data dengan peralatan yang lain. Sistem informasi berbasis web adalah sebuah sistem informasi yang menggunakan teknologi web atau internet untuk memberikan informasi dan layanan kepada pengguna atau sistem informasi lain / aplikasi lain. Sebuah sistem informasi web biasanya terdiri dari satu atau lebih aplikasi web yang masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu. Dimana masing masing komponen tersebut saling dukung satu dengan yang lainnya guna mencapai fungsi sistem informasi berbasis web secara umum.

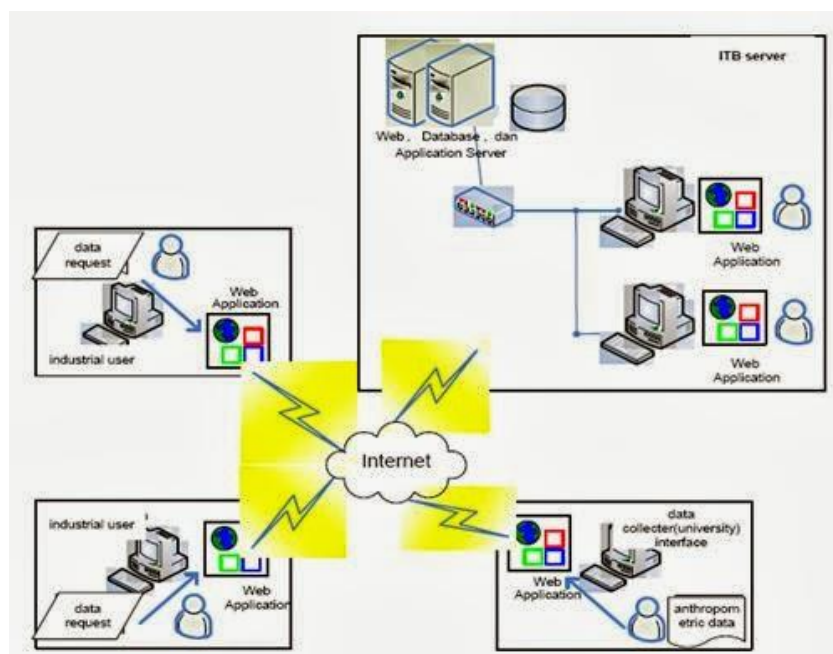
⁶ <http://npermana.mhs.uksw.edu/2012/11/pengertian-sistem-informasi.html>

⁷ James A. O'Brien, 2007 . *Management Information Systems - 10th edition*. Palgrave, Basingstoke, Hal 45.

⁸ Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Palgrave, Basingstoke, Hal 42

Syarat sistem informasi web adalah (1) sebuah web server yang mumpuni untuk mendukung sistem informasi tersebut; (2) Software Pemrograman Web (harus ada sebuah bahasa pemrograman web sebagai pendamping HTML); dan (3) database yang handal untuk menyimpan dan manajemen data. Database yang dipergunakan harus mampu menangani berjuta-juta data dan dapat diakses dengan sangat cepat. Basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi, karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para pemakai. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data (database system) adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi.

Gambaran mekanisme sistem ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Sistem Informasi Berbasis Web

C. Metode Penyediaan Data Gender

1. Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder didasarkan pada instrumen check list yang akan dimintakan kepada Perangkat Daerah (PD) pengampu. Data sekunder diolah dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi akurat dalam pengambilan keputusan. Data sekunder ini diperkuat dengan diperoleh melalui desk Perangkat Daerah (PD) khususnya menentukan isu gender dari hasil olahan data sekunder serta informasi berkaitan program dan kegiatan yang relevan.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan pengelompokan data sesuai variabel yang disusun, dan dirumuskan berdasarkan tahun. Data yang telah terkompilasi selanjutnya ditabulasikan atau disusun dalam bentuk grafik sehingga memudahkan untuk dibaca.

3. Integrasi dalam Sistem Data Gender

Siklus hidup pengembangan sistem data gender dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis gender. Siklus hidup pengembangan sistem informasi saat ini terbagi atas enam tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan Sistem.

Dalam tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas, pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemakai informasi, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan, sumber daya baru direncanakan untuk, dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem.

b. Tahap Analisis Sistem.

Dalam tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan, kebutuhan, prioritas dan kendala sistem, ditambah identifikasi biaya, keuntungan. Ruang lingkup analisis sistem ditentukan pada tahap ini. Profesional sistem

mewawancarai calon pemakai dan bekerja dengan pemakai yang bersangkutan untuk mencari penyelesaian masalah dan menentukan kebutuhan pemakai.

c. Tahap Perancangan Sistem Secara Umum/Konseptual.

Dalam tahap ini dibentuk alternatif perancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Alternatif ini merupakan perluasan kebutuhan pemakai. Alternatif perancangan konseptual memungkinkan manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok untuk kebutuhan mereka. Pada tahap ini analisis sistem mulai merancang proses dengan mengidentifikasikan laporan dan output yang akan dihasilkan oleh sistem yang diusulkan.

d. Tahap Evaluasi dan Seleksi Sistem.

Akhir tahap perancangan sistem menyediakan point utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu dalam tahap evaluasi dan seleksi sistem ini nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem.

e. Tahap Perancangan Sistem.

Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual. Pada tahap ini semua semua komponen dirancang dan dijelaskan secara detil. Perencanaan output (layout) dirancang untuk semua layar, form-form tertentu dan laporan-laporan yang dicetak. Semua output ditinjau ulang dan disetujui oleh pemakai dan didokumentasikan. Pada akhir tahap ini laporan rancangan sistem secara detil dihasilkan.

f. Tahap Implementasi Sistem dan Pemeliharaan Sistem.

Pada tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru.

4. Analisis Data

Analisis data sekunder merupakan analisis data survei yang telah tersedia. Analisis ini mencakup interpretasi, kesimpulan atau tambahan pengetahuan dalam bentuk lain. Dari data sekunder didapat dua manfaat yang menyertainya. Analisis sekunder dapat menjadi alternatif untuk mendapat jawaban yang tidak didapat dari penelitian primer. Analisis data

sekunder bermanfaat sebagai alat komparasi dengan data yang telah ada untuk mencari perbedaan dengan temuan yang baru.

Analisis lain yang digunakan adalah analisis gender. Analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena sistem ketidakadilan gender tersebut. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.⁹ Pada dokumen ini Analisis Gender digunakan untuk menganalisis data gender yang akan menghasilkan isu gender. Isu gender inilah yang akan di gunakan sebagai bahan perencanaan penganggaran.

⁹ Permendagri 67 tahun 2011

BAB III

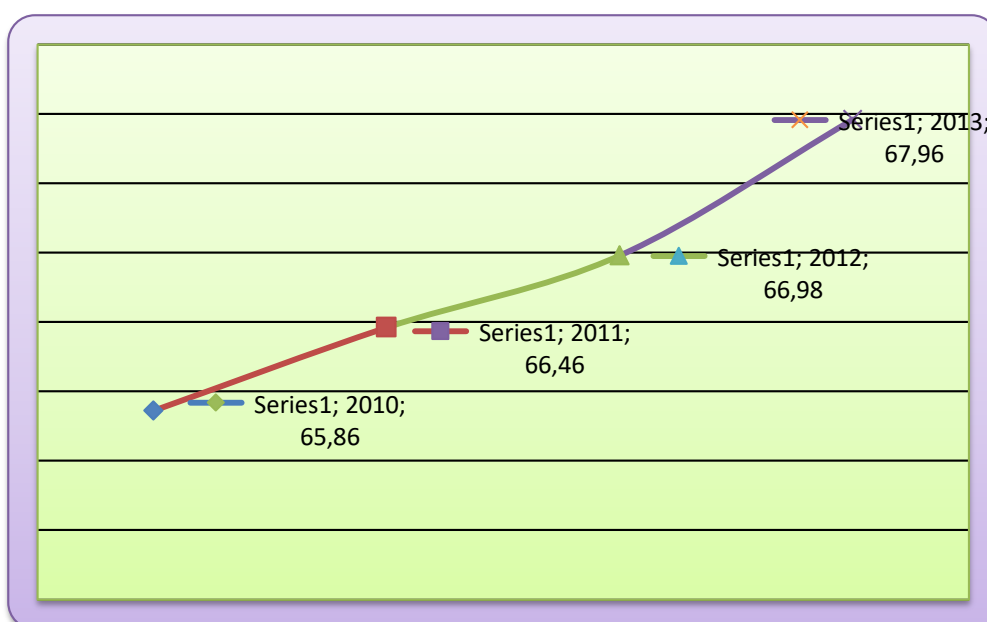
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA BEKASI

A. Indikator Utama dalam PUG

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

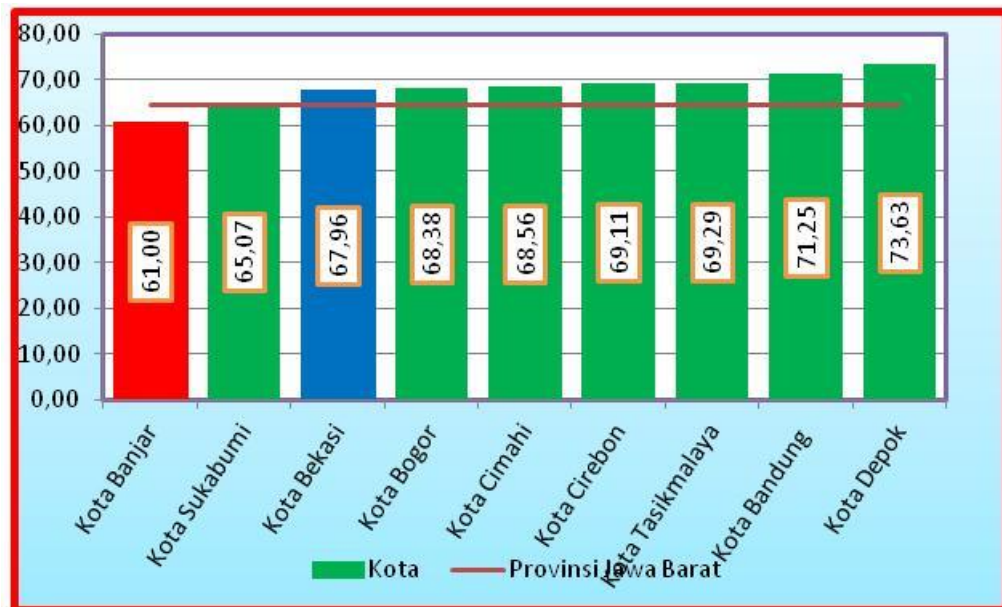
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan capaian IPG Kota Bekasi pada kurun waktu 2010-2013 menunjukkan tren yang positif karena capaiannya selalu meningkat. Perkembangan capaian IPG tahun 2010-2013 Kota Bekasi dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:



Grafik 3.1.
Perkembangan Capaian IPG Kota Bekasi Tahun 2010-2013
Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Capaian IPG Kota Bekasi pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa Barat masih belum begitu baik. Dari 9 kota yang ada di Jawa Barat, Kota Bekasi posisinya hanya di atas Kota Banjar dan Kota Sukabumi. Meskipun demikian capaian Kota Bekasi (67,96) sudah berada di atas-rata capaian Provinsi Jawa Barat (64,91). Perbandingan capaian IPG Kota Bekasi dengan kota-kota lain dan capaian rata-rata Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 3.2.
Perbandingan Capaian IPG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Indikator pembentuk IPG pada dasarnya sama dengan indikator komposit IPM. Perbedaan yang melandasi diantara keduanya adalah, dalam penghitungan capaiannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian ini dilakukan dalam rangka mengetahui ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. IPG memiliki 3 indikator yaitu; indikator pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Pada bidang pendidikan terdapat indikator melek huruf, akses pendidikan dasar, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Pada bidang kesehatan terdapat angka harapan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan pada bidang ekonomi kita bisa melihat dari pendapatan, daya beli, lapangan pekerjaan, status pekerjaan dan jenis pekerjaan.

Tabel 3.1.
Indikator Pembentuk Indek Pembangunan Gender (IPG)
Kota Bekasi Tahun 2011-2013

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)		Angka Melek Huruf (%)		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		Sumbangan Pendapatan (%)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2011	67,72	71,67	99,83	98,37	11,22	10,16	73,07	26,98
2012	67,78	71,73	99,83	98,38	11,34	10,34	73,06	26,94
2013	68,13	72,07	99,85	98,39	11,34	10,34	72,60	27,40

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Pertumbuhan IPG dari tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan tren meningkat meskipun kondisinya fluktuatif. Pertumbuhan capaian IPG Kota Bekasi dibandingkan dengan kota sekitar dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Perbandingan Capaian IPG Kota Bekasi dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011- 2013

Kota	2010	2011	r	2012	r	2013	r
Kota Bekasi	65,86	66,5	0,91	67	0,78	67,96	1,46
Kota Bogor	66,43	67,1	1,05	67,9	1,10	68,38	0,75
Kota Sukabumi	62,87	63,6	1,21	64,2	0,88	65,07	1,37
Kota Bandung	69,08	69,7	0,83	70,6	1,42	71,25	0,86
Kota Cirebon	67,01	67,6	0,85	68,2	0,93	69,11	1,32
Kota Depok	71,94	72,7	1,03	72,9	0,36	73,63	0,95
Kota Cimahi	66,78	67,4	0,93	67,9	0,77	68,56	0,94
Kota Tasikmalaya	67,44	68,1	0,99	68,5	0,63	69,29	1,09
Kota Banjar	58,72	59,4	1,16	59,8	0,64	61	2,04
Provinsi Jawa Barat	62,38	63,3	1,39	63,7	0,68	64,61	1,46

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Angka Harapan Hidup di Kota Bekasi masih terlihat lebih tinggi perempuan dibanding dengan laki-laki. Pada tahun 2013, Angka Harapan Hidup laki-laki sebesar 68,13 tahun dan perempuan sebesar 72,1 tahun. Perkembangan Angka Harapan Hidup berdasarkan jenis kelamin di Kota Bekasi dalam tiga tahun terakhir terlihat tidak mengalami peningkatan yang besar.

Rata-rata Angka Usia Harapan Hidup di Kota Bekasi sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Harapan Hidup laki-laki dan perempuan Provinsi Jawa Barat. Indikator Angka Harapan Hidup

berdasarkan jenis kelamin dan perbandingannya dengan kota lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup
Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2013

Kota	Angka Harapan Hidup									
	2011		2012		r		2013		r	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	67,72	71,7	67,78	71,7	0,09	0,08	68,13	72,1	0,52	0,47
Kota Bogor	66,94	70,9	67,04	71	0,15	0,14	67,22	71,2	0,27	0,23
Kota Sukabumi	67,52	71,5	67,77	71,7	0,37	0,38	68,33	72,3	0,83	0,74
Kota Bandung	67,8	71,8	67,87	71,8	0,10	0,10	68,1	72	0,34	0,31
Kota Cirebon	66,57	70,5	66,59	70,6	0,03	0,03	67,01	71	0,63	0,57
Kota Depok	71,25	75,1	71,37	75,2	0,17	0,16	71,71	75,5	0,48	0,40
Kota Cimahi	67,26	71,2	67,32	71,3	0,09	0,10	67,79	71,7	0,70	0,62
Kota Tasikmalaya	67,94	71,9	68,3	72,3	0,53	0,53	68,78	72,7	0,70	0,59
Kota Banjar	64,37	68,3	64,48	68,4	0,17	0,16	64,88	68,8	0,62	0,60
Provinsi Jawa Barat	66,27	70,3	66,48	70,5	0,32	0,30	67,07	71	0,89	0,79

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Kondisi penduduk yang telah melek huruf di Kota Bekasi pada tahun 2013 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebesar 99,13%, dengan kata lain masih ada 0,87% penduduk Kota Bekasi yang berusia di atas 15 tahun yang masih dalam kondisi buta huruf.

Apabila dirinci dari jenis kelamin, AMH penduduk berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan AMH penduduk perempuan. AMH penduduk laki-laki pada tahun 2013 sebesar 99,85%, sedangkan AMH penduduk perempuan sebesar 98,4%.

Perbandingan capaian angka melek huruf Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin dengan kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Barat secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Indikator Angka Melek Huruf
Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2013

Kota	Angka Melek Huruf									
	2011		2012		r		2013		r	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	99,83	98,4	99,83	98,4	0,00	0,01	99,85	98,4	0,02	0,01
Kota Bogor	99,16	98,1	99,48	98,5	0,32	0,42	99,48	98,5	0,00	0,03
Kota Sukabumi	99,93	99,4	99,96	99,4	0,03	0,03	99,97	99,4	0,01	0,01
Kota Bandung	99,96	99,6	99,97	99,7	0,01	0,01	99,98	99,7	0,01	0,01
Kota Cirebon	99,54	97	99,73	97,2	0,19	0,20	99,74	98	0,01	0,81
Kota Depok	99,84	98,5	99,87	98,5	0,03	0,02	99,88	98,5	0,01	0,02
Kota Cimahi	99,95	99,7	99,98	99,7	0,03	0,04	99,99	99,8	0,01	0,02
Kota Tasikmalaya	99,85	99,3	99,89	99,7	0,04	0,40	99,91	99,7	0,02	0,04
Kota Banjar	98,67	96,2	98,69	96,2	0,02	0,02	99,87	98,1	1,20	2,03
Provinsi Jawa Barat	98,03	94,6	98,08	94,7	0,05	0,05	98,39	95,3	0,32	0,68

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2013 telah mencapai 10,82 tahun. angka tersebut masih sama dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut maka dapat diartikan bahwa penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 rata-rata telah mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMA/SMK/MA.

Apabila dipilah menurut jenis kelamin maka angka rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan adanya ketimpangan. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas laki-laki mencapai 11,34 tahun, sedangkan untuk perempuan baru mencapai 10,3 tahun.

Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bekasi berdasarkan jenis kelamin dan perbandingannya dengan kota yang lain serta Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah
Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2013

Kota	Rata-Rata Lama Sekolah									
	2011		2012		r		2013		r	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	11,22	10,2	11,34	10,3	1,07	1,77	11,34	10,3	0,00	0,00
Kota Bogor	10,94	8,98	10,94	9,37	0,00	4,34	10,95	9,38	0,09	0,11
Kota Sukabumi	9,89	9,32	9,89	9,32	0,00	0,00	9,9	9,33	0,10	0,11
Kota Bandung	10,84	10,1	10,89	10,3	0,46	2,38	10,89	10,4	0,00	0,10
Kota Cirebon	10,81	9,29	11,01	9,49	1,85	2,15	11,02	9,5	0,09	0,11
Kota Depok	11,9	10,5	11,9	10,6	0,00	0,09	11,9	10,6	0,00	0,00
Kota Cimahi	11,16	10,3	11,16	10,3	0,00	0,00	11,18	10,4	0,18	0,78
Kota Tasikmalaya	9,33	8,44	9,34	8,6	0,11	1,90	9,34	8,61	0,00	0,12
Kota Banjar	8,67	7,79	8,67	7,79	0,00	0,00	8,69	7,83	0,23	0,51
Provinsi Jawa Barat	8,42	7,64	8,44	7,65	0,24	0,13	8,45	7,69	0,12	0,52

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Indikator Sumbangan Pendapatan Perempuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Indikator Sumbangan Pendapatan
Kota Bekasi dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2013

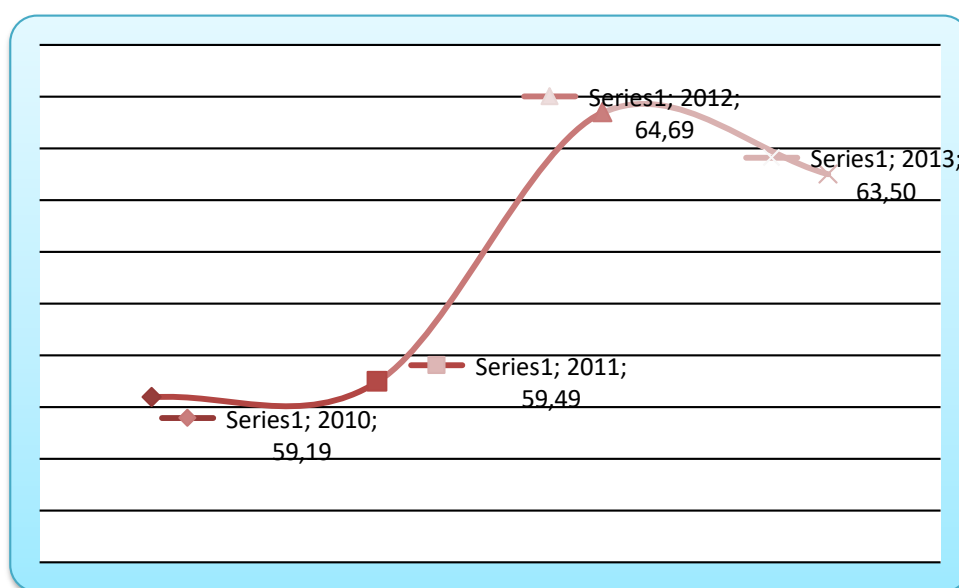
Kota	Sumbangan Pendapatan									
	2011		2012		r		2013		r	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kota Bekasi	73,07	26,9	73,06	26,9	-0,01	0,00	72,6	27,4	-0,63	1,71
Kota Bogor	71,53	28,5	71,53	28,5	0,00	0,00	71,28	28,7	-0,35	0,88
Kota Sukabumi	74,26	25,7	74,81	25,2	0,74	-2,14	74,25	25,8	-0,75	2,22
Kota Bandung	68,12	31,9	68,11	31,9	-0,01	0,00	67,79	32,2	-0,47	1,00
Kota Cirebon	69,99	30	69,98	30	-0,01	0,00	69,44	30,6	-0,77	1,80
Kota Depok	69,18	30,8	68,88	31,1	-0,43	0,97	68,48	31,5	-0,58	1,29
Kota Cimahi	69,07	30,9	71,04	29	2,85	-6,37	70,81	29,2	-0,32	0,79
Kota Tasikmalaya	69,4	30,6	68,77	31,2	-0,91	2,06	68,25	31,8	-0,76	1,67
Kota Banjar	75,79	24,2	74,67	25,3	-1,48	4,63	74,29	25,7	-0,51	1,50
Provinsi Jawa Barat	62,38	27,38	72,31	27,7	15,92	1,17	71,95	28,1	-0,50	1,30

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

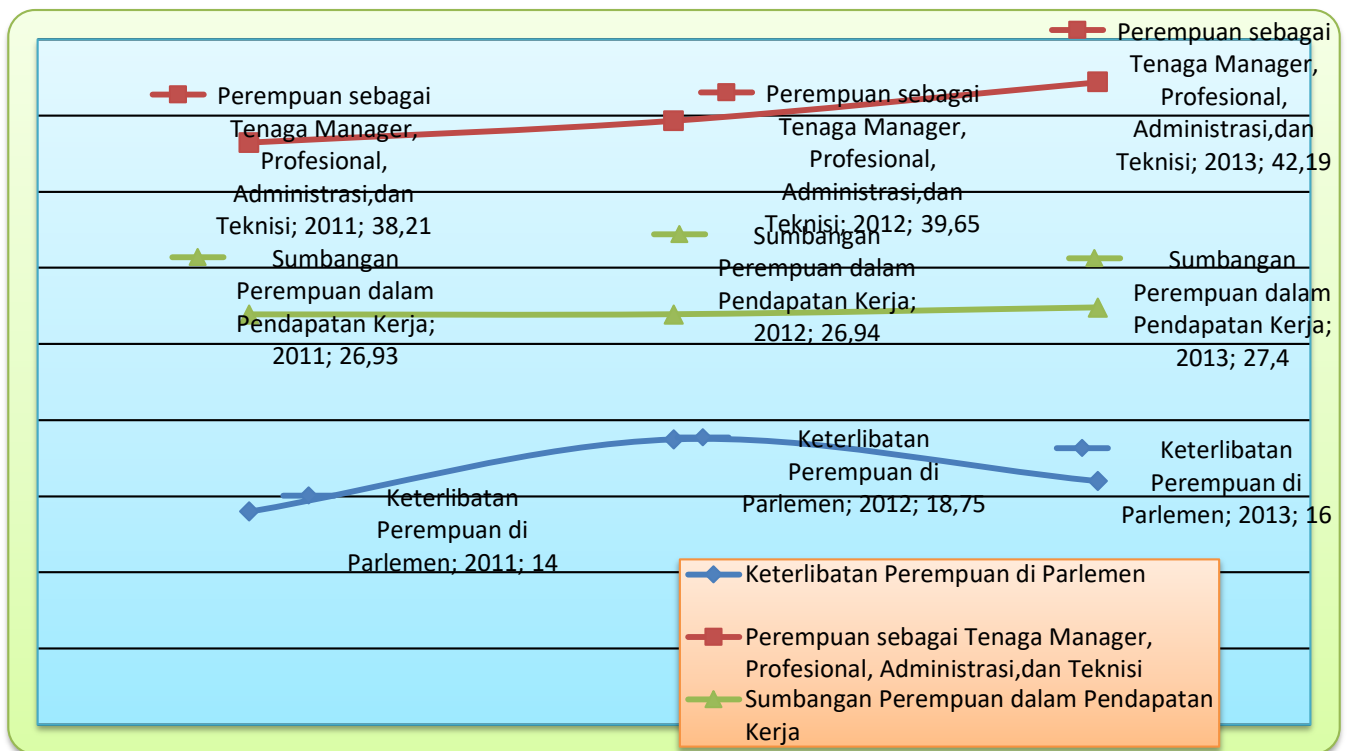
IDG atau juga disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. IDG menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi serta bagian dalam pengambilan keputusan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dalam kurun waktu 2010-2013 menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan tren meningkat. Perkembangan IDG Kota Bekasi secara rinci dapat dilihat pada grafik yang tersaji dibawah ini:



Grafik 3.3.
Capaian IDG Kota Bekasi Tahun 2010-2013
Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

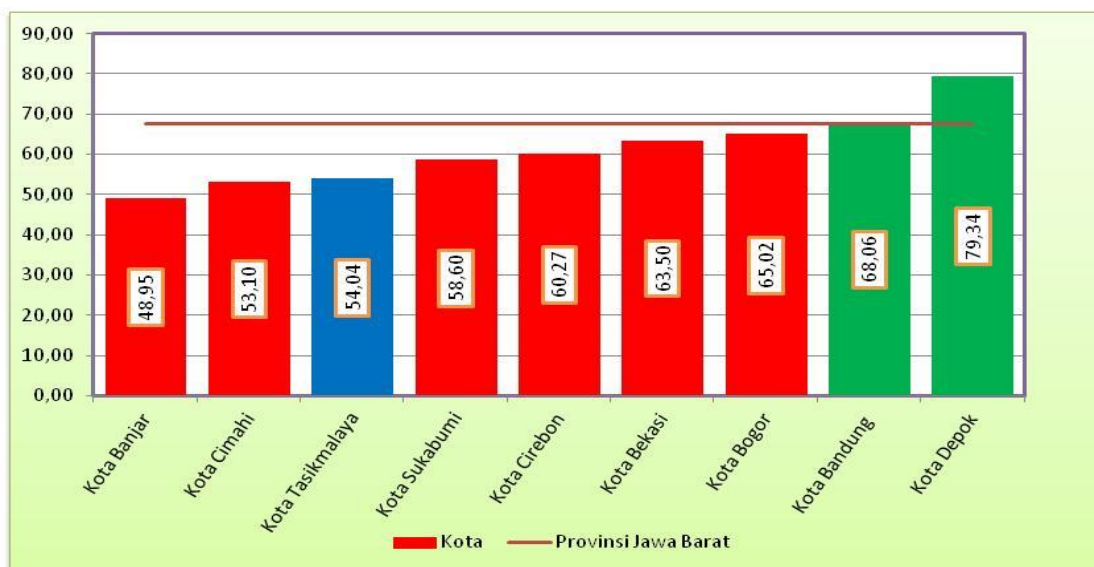
Adapun capaian indikator pembentuk IDG di Kota Bekasi trennya juga mengalami peningkatan. Semua capaian indikator pembentuk IDG nilainya naik setiap tahunnya kecuali indikator keterlibatan perempuan di parlemen yang kondisinya fluktuatif.



Grafik 3.4.
Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kota Bekasi Tahun 2011-2013

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Jika dibandingkan dengan capaian kota lainnya di Jawa Barat, capaian IDG Kota Bekasi tahun 2013 hanya lebih rendah dari capaian Kota Bogor, Bandung dan Depok. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Jawa Barat, capaian Kota Bekasi masih berada di bawahnya karena capaian Provinsi Jawa Barat adalah 67,57 sedangkan Kota Bekasi baru 63,50. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi dibandingkan dengan capaian IDG kota se Jawa Barat secara lengkap sebagai berikut.



Grafik 3.5.
Perbandingan Capaian IDG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014*

Pertumbuhan IDG dari tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan tren meningkat meskipun kondisinya fluktuatif, bahkan tahun 2012 ke 2013 capaiannya justru mengalami penurunan. Pertumbuhan capaian IDG Kota Bekasi dibandingkan dengan kota sekitar dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian IDG Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013

Kota	2010	2011	r	2012	r	2013	r
Kota Bekasi	59,19	59,5	0,51	64,7	8,74	63,5	-1,84
Kota Bogor	62,6	64,8	3,43	66,1	2,07	65,02	-1,62
Kota Sukabumi	52,65	53,6	1,77	52,3	-2,46	58,6	12,13
Kota Bandung	64,53	65,8	1,91	67,8	3,06	68,06	0,43
Kota Cirebon	53,28	52,4	-1,71	52,3	-0,23	60,27	15,35
Kota Depok	77,29	76,4	-1,19	79,6	4,16	79,34	-0,26
Kota Cimahi	66,15	66,5	0,54	69,3	4,16	53,1	-23,35
Kota Tasikmalaya	54,97	50,6	-7,95	55,2	9,15	54,04	-2,15
Kota Banjar	53,85	55,8	3,62	51,7	-7,40	48,95	-5,26
Provinsi Jawa Barat	67,01	68,1	1,60	68,3	0,29	67,57	-1,04

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014*.

Indikator pertama dari pembentuk IDG adalah Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Capaian indikator ini di Kota Bekasi kondisinya fluktuatif, sempat naik pada tahun 2012 namun turun lagi pada tahun 2013.

Perbandingannya dengan kota lain dan Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perbandingan Capaian Indikator Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013

Kota	2011	2012	r	2013	r
Kota Bekasi	14	18,75	33,93	16	-14,67
Kota Bogor	17,78	17,78	0,00	17,78	0,00
Kota Sukabumi	10	10	0,00	13,33	33,30
Kota Bandung	18	18	0,00	18	0,00
Kota Cirebon	6,9	6,67	-3,33	11,54	73,01
Kota Depok	34	38	11,76	34	-10,53
Kota Cimahi	20	22,22	11,10	5	-77,50
Kota Tasikmalaya	6,67	6,67	0,00	4,44	-33,43
Kota Banjar	12	8	-33,33	8	0,00
Provinsi Jawa Barat	24	24	0,00	22	-8,33

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Indikator kedua adalah Perempuan sebagai Tenaga Manajerial, Teknisi dan Administrasi. Capaian indikator ini mengalami tren yang positif karena nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Perbandingan capaian indikator ini dengan capaian kota lain dan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Capaian Perempuan sebagai Tenaga Manajerial, Teknisi, dan Administrasi Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013

Kota	2011	2012	r	2013	r
Kota Bekasi	38,21	39,7	3,77	42,2	6,41
Kota Bogor	37,98	40,8	7,32	35,8	-12,19
Kota Sukabumi	39,91	33,6	-15,89	40,7	21,09
Kota Bandung	36,92	39,8	7,75	39,1	-1,78
Kota Cirebon	33,12	32,4	-2,23	37,7	16,34
Kota Depok	35,32	40	13,25	43,5	8,73
Kota Cimahi	44,25	43	-2,76	44,9	4,28
Kota Tasikmalaya	28,99	40,2	38,57	45,6	13,62
Kota Banjar	43,32	43,8	1,08	33	-24,66
Provinsi Jawa Barat	38,19	38,8	1,49	38,4	-0,83

Sumber: Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014.

Indikator terakhir adalah Sumbangan Pendapatan Perempuan. Tren capaian indikator ini di Kota Bekasi juga bagus karena meningkat dari tahun

ke tahun. Perbandingan dengan kota lain dan Provinsi Jawa Barat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Indikator Sumbangan Perempuan dalam
Pendapatan Kerja Kota Bekasi dengan Kota Lainnya dan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013

Kota	2011	2012	r	2013	r
Kota Bekasi	26,93	26,9	0,04	27,4	1,71
Kota Bogor	28,47	28,5	0,00	28,7	0,88
Kota Sukabumi	25,74	25,2	-2,14	25,8	2,22
Kota Bandung	31,88	31,9	0,03	32,2	1,00
Kota Cirebon	30,01	30	0,03	30,6	1,80
Kota Depok	30,82	31,1	0,97	31,5	1,29
Kota Cimahi	30,93	29	-6,37	29,2	0,79
Kota Tasikmalaya	30,6	31,2	2,06	31,8	1,67
Kota Banjar	24,21	25,3	4,63	25,7	1,50
Provinsi Jawa Barat	27,38	27,7	1,13	28,1	1,30

Sumber: *Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012-2014*.

B. Indikator Pembangunan Daerah

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar untuk pembangunan daerah. Kualitas pendidikan yang baik akan berdampak pada kemajuan suatu daerah demikian juga sebaliknya jika pendidikan berkualitas buruk, bisa dipastikan bahwa daerah tersebut memiliki daya saing rendah dengan daerah lain.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Peningkatan dan penyetaraan kualitas pendidikan akan dapat dicapai apabila laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang baik dalam bidang pendidikan.

a. Jumlah Guru

Salah satu faktor penunjang dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah ketersediaan guru. Guru dan kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut.

Jumlah guru yang tersedia pada jenjang pendidikan PAUD di Kota Bekasi tahun 2011-2013 mengalami perkembangan yang cukup baik. Jumlah guru laki-laki meningkat pada perioder tersebut, sementara jumlah guru perempuan mengalami penurunan pada tahun 2013. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar jumlah guru laki-laki meningkat dari 3.240 orang tahun 2011 menjadi 3.563 orang tahun 2013. Untuk guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar tahun 2011-2012 mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah guru SD perempuan sebanyak 7.247 orang, meningkat menjadi 7.860 orang. Tahun 2013 jumlah guru perempuan menurun menjadi 7.307 orang. Pada jenjang pendidikan SMP jumlah guru laki-laki cenderung mengalami penurunan. Jumlah guru tahun 2011 sebesar 1.856 orang menurun menjadi 1.732 orang tahun 2013. Sementara itu untuk jumlah guru SMP perempuan tahun 2011 sebanyak 2.495 orang tahun 2012 meningkat menjadi 2.497 orang. Tahun 2013 jumlah guru menurun menjadi 2.354 orang. Pada jenjang pendidikan SMA jumlah guru mengalami perkembangan yang fluktuaktif dimana tahun 2011-2012 mengalami peningkatan, namun tahun 2013 mengalami penurunan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Jumlah Guru di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Guru Jenjang Pedidikan PAUD	2010		2011		2012		2013		2014	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
PAUD	na	na	62	2.587	66	2.933	107	2.326	na	na
SD	na	na	3.240	7.247	3.467	7.860	3.563	7.307	na	na
SMP	na	na	1.856	2.495	1.742	2.497	1.732	2.354	na	na
SMA	na	na	1.965	2.130	1.826	2.135	1.835	2.090	na	na
Jumlah	na	na	7.123	14.459	7.101	15.425	7.237	14.077	na	na

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2015

b. Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal dan Jalur Non Formal

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Jumlah peserta pendidikan PAUD di Kota Bekasi selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2011 sebesar 10.833 orang, terbagi atas 5.346 laki-laki dan 5.487 perempuan. Tahun 2013 meningkat menjadi 16.014 orang, terbagi atas 7.687 laki-laki dan 8.327 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Jumlah Peserta PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Jumlah Peserta	2010		2011		2012		2013		2014	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
PAUD Jalur Formal	na	na	5.346	5.487	7.423	7.829	7.687	8.327	na	na
PAUD jalur non formal	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2015

c. Jumlah PAUD Formal dan Non Formal

Salah satu pemenuhan hak pendidikan sejak dini pada usia 3-5 tahun, dilaksanakan melalui Program pendidikan Usia Dini. PAUD merupakan pemenuhan hak pendidikan selain Taman Kanak-Kanak (TK) atau TPA. Jumlah PAUD Formal dan Non Formal di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Jumlah Lembaga Pendidikan PAUD di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Jenis PAUD	2010	2011	2012	2013	2014
Formal	na	1.153	1.315	792	na
Non Formal	na	1.285	1.289	1.059	na

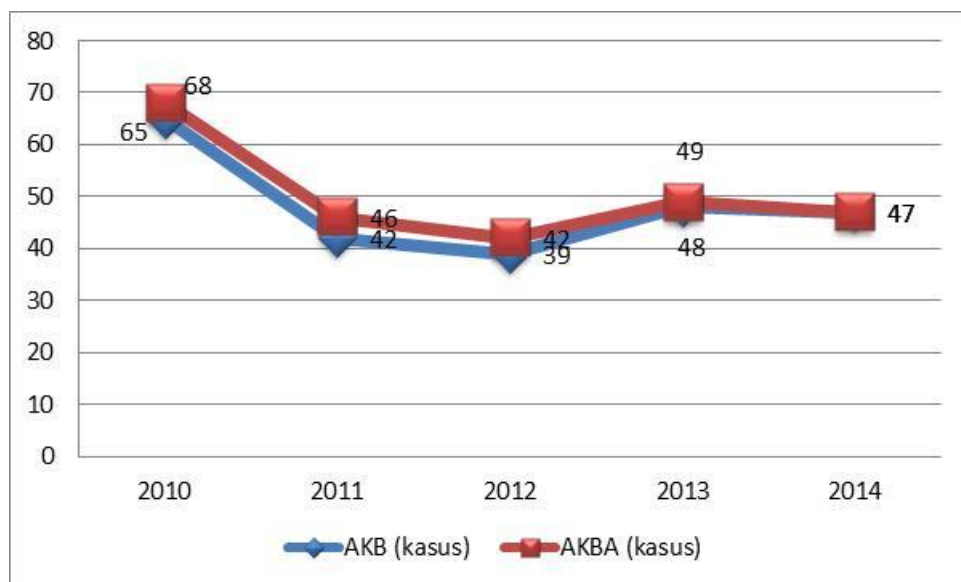
Sumber :Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2015

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Bayi adalah anak berusia 0 - 1 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

Jumlah bayi yang meninggal dari tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 kasus kematian bayi sebanyak 65 kasus menurun pada tahun 2014 menjadi 47 kasus.



Grafik 3.6.
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kota Bekasi
Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2015

Penyebab kematian bayi di Kota Bekasi sebagian besar adalah masalah yang terjadi pada bayi baru lahir/neonatal (umur 0-28 hari). Masalah neonatal ini meliputi asfiksia (kesulitan bernafas saat lahir), Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan infeksi. Diare dan pneumonia merupakan penyebab kematian berikutnya pada bayi dan balita, disamping penyakit lainnya serta dikontribusi oleh masalah gizi.

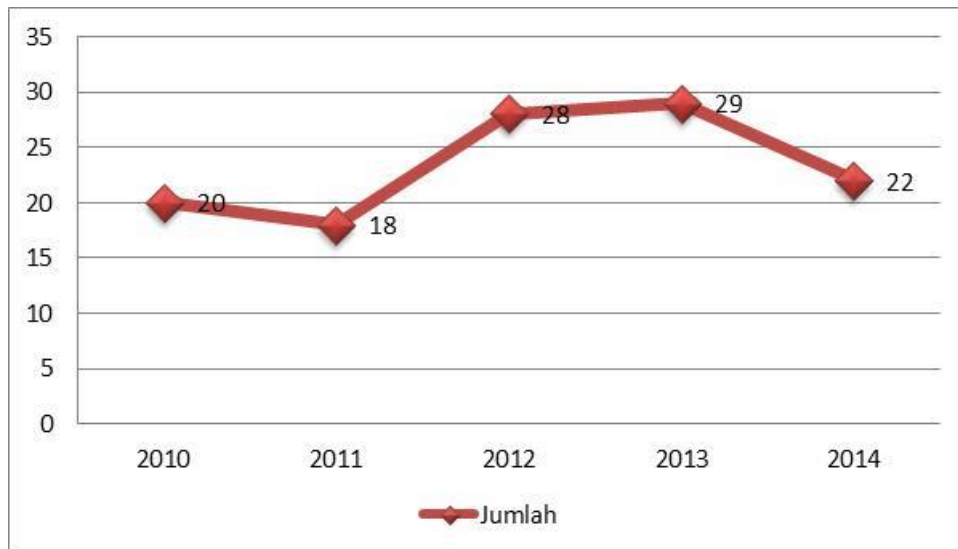
Kematian Balita di Kota Bekasi dari tahun 2010 – 2014 juga mengalami penurunan dari 68 kasus menjadi 47 kasus. Kematian balita dihitung pada anak usia 0 – 5 tahun. Melihat data diatas dapat dikatakan pada tahun 2014 tidak terjadi kematian balita. Hal ini dikarenakan kasus kematian dan balita jumlahnya sama. Penyebab kematian pada balita adalah penyakit infeksi, diare dan pneumonia. Diare erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, ketersediaan air bersih, serta sanitasi dasar. Pneumonia terkait erat dengan indoor and outdoor pollution (polusi didalam dan di luar ruangan), ventilasi, kepadatan hunian, jenis bahan bakar yang dipakai, kebiasaan merokok, status gizi, status imunisasi dan lama pemberian ASI.

Beberapa faktor menjadi penyebab tidak langsung kematian bayi dan balita. Dari sisi kebutuhan (demand), antara lain adalah sosial ekonomi yang rendah, pendidikan ibu, kondisi sosial budaya yang tidak mendukung, kedudukan dan peran perempuan yang tidak mendukung, akses sulit, serta perilaku perawatan bayi dan balita yang tidak sehat. Sementara ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum merata, kesinambungan pelayanan KIA yang belum memadai, pembiayaan pelayanan KIA yang belum memadai, menyumbangkan masalah dari sisi supply

Bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan pada tahun 2013 sebanyak 2.845 bayi dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 7.216 bayi.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.



Grafik 3.7.
Jumlah Kejadian Kematian Ibu Melahirkan di Kota Bekasi
Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2015

Jumlah kematian ibu di Kota Bekasi dari tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 20 kasus meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2014.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul adalah pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejangkejang, aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalnya, pemberdayaan perempuan yang tak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Kaum lelaki pun dituntut harus berupaya ikut aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami.

Pendarahan menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu (28 persen) , anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu. Di berbagai negara paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10 persen sampai hampir 60 persen. Walaupun seorang perempuan bertahan hidup setelah mengalami pendarahan pasca persalinan, namun ia akan menderita akibat kekurangan darah yang berat (anemia berat) dan akan mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan.

Persentase tertinggi kedua penyebab kematian ibu yang adalah eklamsia (24persen), kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) yang tidak terkontrol saat persalinan. Hipertensi dapat terjadi karena kehamilan, dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil. Sedangkan persentase tertinggi ketiga penyebab kematian ibu melahirkan adalah infeksi (11 persen).

Penurunan AKI dapat ditekan dengan meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Bekasi dari tahun 2010 – 2014 fluktuatif. Pada tahun 2010 cakupan tersebut sebesar 85,9% meningkat pada tahun 2012 menjadi 87,5% dan mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi 84,9%. Kondisi dibawah target yang ditentukan oleh Kementrian Kesehatan dalam Standar Pelayanan Minimal (741/2008) yaitu 90% tahun 2010.

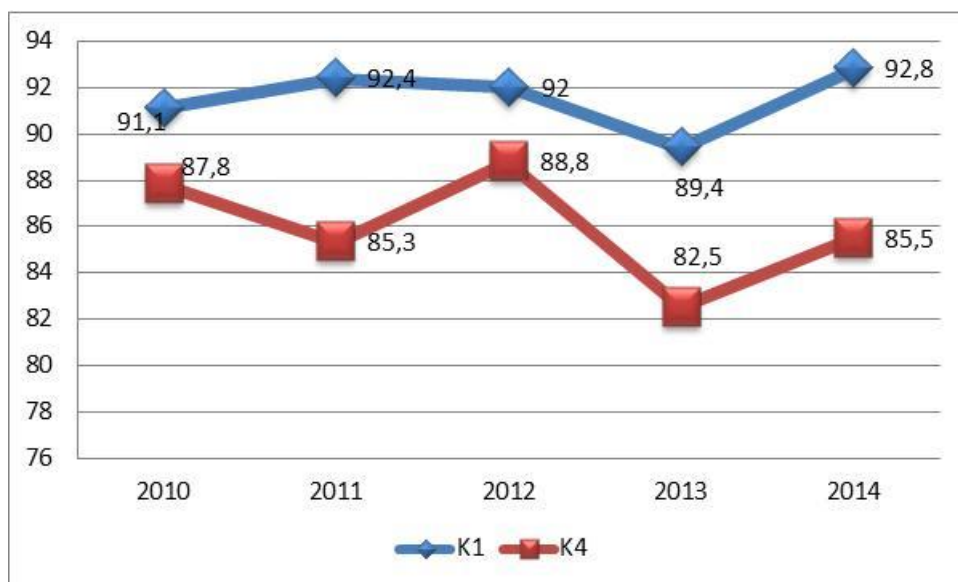


Grafik 3.8.
Cakupan Petolongan Persalinan Oleh Nakes yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Bekasi tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2015

Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya juga menjadi penting dalam menekan angka kematian ibu hamil. Tingkat kesadaran ibu hamil dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke-empat (atau lebih) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, dengan ketentuan : satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga (Depkes RI, 2004).

Cakupan K1 Kota Bekasi pada tahun 2010 sebesar 91,1% meningkat menjadi 92,8%. Sedangkan cakupan K4 pada tahun 2010 adalah sebesar 87,8% menurun pada tahun 2014 menjadi 85,5%.



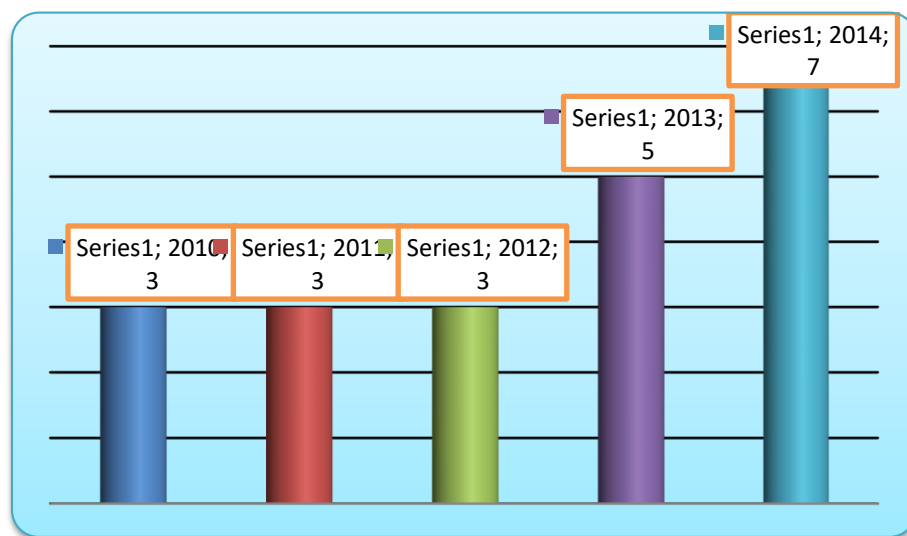
Grafik 3.9.
Cakupan K1 dan K4 di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2015

3. Perhubungan

Manajemen lalu lintas merupakan pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan dan memperbaiki keselamatan dari pengguna jalan sebaik mungkin. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan salah satu program inovatif dalam bentuk zona kecepatan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area sekolah pada jam tertentu.

Zona Selamat Sekolah (Zoss) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. ZOSS merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak. Kota Bekasi memiliki Zona Selamat Sekolah yang tersebar pada beberapa lokasi. Jumlah ZOSS yang terpasang tahun 2010-2014 sebanyak 7 unit. Perkembangan ZOSS setiap tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.10.
Jumlah Zona Selamat Sekolah di Kota Bekasi
Tahun 2010-2014

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2015

4. Kependudukan dan Pencatatan sipil

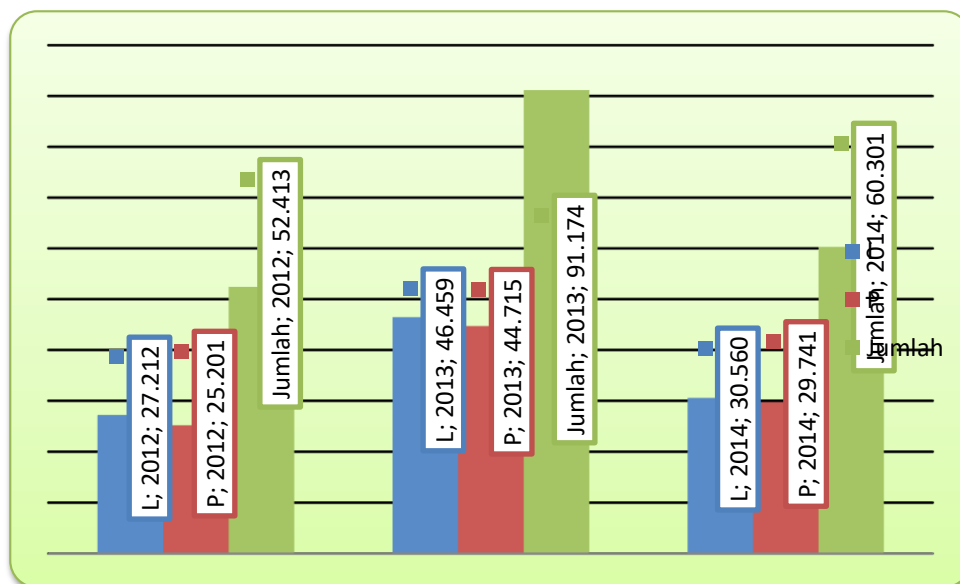
a. Bayi Berakte Kelahiran

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak yang

identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

Hak-hak Anak diberbagai Undang-Undang, antara lain UU No. 39/1999 tentang HAM maupun UU No. 34/2014 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Jumlah Bayi Berakte Kelahiran tercatat mengalami perkembangan yang fluktuatif selama tahun 2012-2014. Tahun 2012 tercatat jumlah bayi berakte sebanyak 52.413 orang, terbagi atas 27.212 laki-laki dan 25.201 perempuan. Tahun 2014 jumlah bayi berakte tercatat sebanyak 60.301 orang, terbagi atas 30.560 laki-laki dan 29.741 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.11.
Jumlah Bayi Berakte Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2012-2014

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2015

b. Pasangan berakte nikah

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena sudah merasa sah sesuai dengan ketentuan agama, bisa juga dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI). Perkawinan tak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan Bawah Tangan.

Jumlah pasangan berakate nikah di Kabupaten Bekasi tahun 2013 tercatat 2.279 akta dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2.809 akta.

c. Kepemilikan KTP

Kartu tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNI). Kartu ini wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau yang sudah menikah. Anak dari orang tua Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP bagi Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, sedangkan bagi Warga Negara Asing berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap (ITAP). Khusus bagi warga negara yang sudah berusia 60 tahun dan keatas, akan mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

Jumlah kepemilikan KTP di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang menurun tahun 2010-2014. Tahun 2010 jumlah kepemilikan KTP sebanyak 187.960 orang, terbagi 100.358 laki-laki dan 87.602 perempuan.

Tahun 2014 Jumlah kepemilikan KTP sebanyak 112.123 orang, terbagi atas 59.548 laki-laki dan 52.575 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Jumlah Penduduk Memiliki KTP berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Tahun	Kepemilikan KTP		
	L	P	Jumlah
2010	100.358	87.602	187.960
2011	99.964	91.222	191.186
2012	105.024	99.320	204.344
2013	63.473	55.512	118.985
2014	59.548	52.575	112.123

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2015

5. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (Eksekutif)

Perempuan juga dituntut untuk berpartisipasi dalam lembaga Pemerintah. Hal ini terlihat dari salah satu pembentuk dari perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender. Pada tahun 2014 perempuan di lembaga pemerintah hanya 27,26% atau 147.240 orang. Kurangnya partisipasi dalam lembaga pemerintah disebabkan oleh banyak faktor terutama adalah pembuat kebijakan yang belum memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan.

b. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (Legislatif)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang berguna untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun sejauh ini usaha-usaha pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk meningkatkan partisipasi perempuan tersebut belum optimal. Meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama mencalonkan diri, mengikuti kampanye, dan memberikan suara dalam pemilu, tetapi jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif belum mencapai

30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan pemilihan umum.

Di Kota Bekasi persentase perempuan dalam legeslatif hanya 17% (8 orang) sementara dalam melakukan afirmatif action diharapkan mencapai 30%. Pada tahun 2013 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif dengan maksud memberikan pedoman bagi daerah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

c. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta juga merupakan pembentuk perhitungan IDG. Pada lembaga swasta peran perempuan hanya 33,15% (348.971 jiwa), kondisi ini juga masih relatif rendah.

d. Rasio KDRT

Berdasarkan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penanganan Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban negara baik pemerintah pusat, maupun daerah. Namun demikian karena budaya maka kekerasan rumah tangga pada keluarga adalah bagian dari aib keluarga, sehingga banyak korban yang tidak mau melapor. Dalam menyadarkan kondisi ini maka Pemerintah Daerah mulai melakukan sosialisasi dan mendekatkan pelayanan korban kekerasan dengan masyarakat. Hal ini diharapkan kasus kekerasan yang dilaporkan semakin mendekati kondisi nyata di masyarakat.

Di Kota Bekasi Jumlah kasus KDRT tahun 2014 sebanyak 70 kasus, dengan rasio KDRT adalah 437:1. Artinya setiap 437 keluarga baru terjadi 1 kasus kekerasan rumah tangga.

e. Jenis Kekerasan Pada Anak dan Perempuan

Jumlah kekerasan pada perempuan dari tahun 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 249 orang meningkat pada tahun 2012 menjadi 491 orang dan pada tahun 2014 menjadi 138 orang. Kasus kekerasan pada anak dari tahun 2011 – 2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebanyak 83 kasus meningkat menjadi 105 kasus. Seluruh kasus yang dilaporkan mendapat penanganan.



Grafik 3.12.
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak dan KDRT di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Sumber: BP3AKB Kota Bekasi Tahun 2015

f. Kelembagaan

1) Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kelembagaan gender yang ada di Kota Bekasi yaitu Kader Bina Keluarga Balita (BKB); Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan; Pokja PUG; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban.

Selain itu dalam rangka meningkatkan PUG, di Kota Bekasi telah banyak diterbitkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan gender seperti Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang

responsif gender, dan Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan;. Selain itu juga telah ada Rumah Aman (Shelter) untuk perempuan dan anak korban kekerasan.

2) Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Sedangkan untuk pengarusutamaan hak anak (PUHA), telah disusun kebijakan/Perda terkait dengan program/kegiatan yang peduli anak. Selain itu juga telah ada beberapa kelembagaan terkait dengan PUHA. Kelembagaan PUHA yang ada di Kota Bekasi yaitu:

- Bina Keluarga Balita (BKB)
- Posyandu
- Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Organisasi/Forum Anak
- Telepon Sahabat Anak 129
- Gugus Tugas Trafiking
- Gugus Tugas KLA
- Lembaga Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)
- Panti Asuhan Anak Yatim Piatu

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengendalian jumlah penduduk salah satunya dilakukan dengan melakukan pengendalian jumlah kelahiran. Pengendalian jumlah kelahiran dapat dilihat dari banyaknya PUS yang mampu mengatur kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah akseptor KB di Kota Bekasi masih didominasi oleh Perempuan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.13.
Jumlah Akseptor KB di Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010-2014

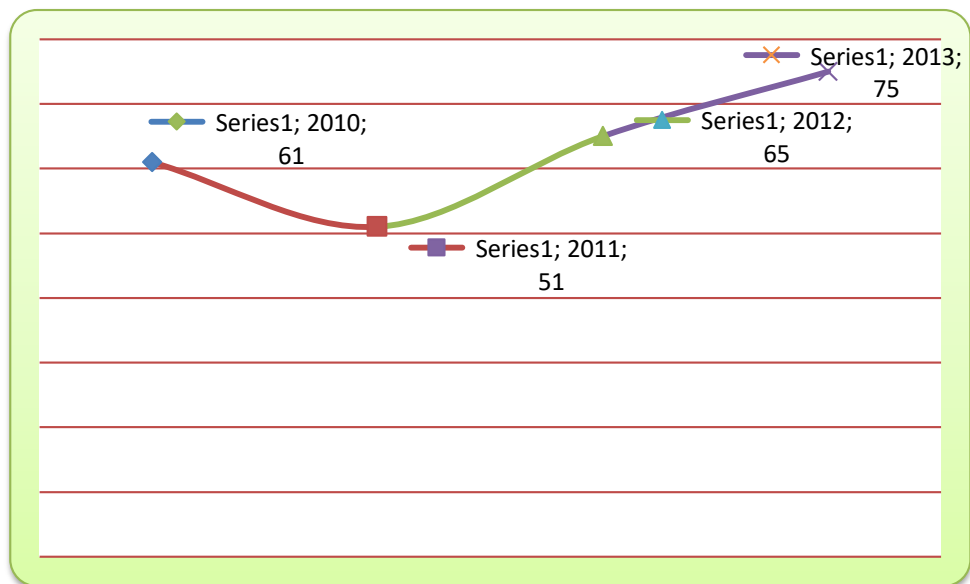
Sumber: BP3AKB Kota Bekasi Tahun 2015

Melihat pada data diatas maka diartikan bahwa laki-laki belum berpartisipasi maksimal dalam pengendalian kelahiran. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alat kontrasepsi pada laki-laki yaitu kondom dan MOP (Vasektomi) selain itu keengganan laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi.

7. Sosial

a. Sarana Pelayanan Sosial

Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi merupakan sarana pelayanan sosial yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah mauun swasta. Jumlah panti asuhan di Kota Bekasi selama tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Tahun 2010 jumlah pantai asuhan sebanyak 61 unit, tahun 2013 meningkat menjadi 75 unit. Perkembangan jumlah panti asuhan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Grafik 3.14.
Jumlah Panti Asuhan di Kota Bekasi Tahun 2010-2013

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2015

b. Anak Jalanan

Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat. Menurut Soedijar (1989) dalam studynya menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempet umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.

Jumlah anak jalanan di Kota Bekasi cukup banyak, dimana tahun 2014 tercatat sebanyak 196 anak jalanan laki-laki dan 188 anak jalanan perempuan. Anak jalanan di Kota Bekasi perlu mendapatkan penanganan yang tepat sehingga tidak menambah permasalahan sosial di Kota Bekasi. Perkembangan jumlah anak jalanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

c. Anak Cacat

Anak cacat adalah yang penampilan gerakannya menyimpang dari gerakan normal secara keseluruhan. Sedangkan menurut The Committee Of National Society For The Study Of Education di AS, anak cacat adalah gerakan-gerakan yang menyimpang dari gerakan yang normal, walaupun telah dikembangkan secara maksimal. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi Fisik, mental, tingkah laku, emosional dan sosial. Perbedaan utama anak cacat dengan anak normal terletak pada keadaan atau kondisi fisik termasuk alat-alat fisik yang tidak lengkap sehingga ia tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya seperti yang dilakukan anak normal.

Jumlah anak cacat di Kota Bekasi tahun 2013 tercatat sebanyak 34 laki-laki dan 20 perempuan.

d. Penyandang HIV

HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Jumlah penyandang HIV di Kota Bekasi tahun 2010 sebanyak 354 orang terbagi atas 223 laki-laki dan 131 perempuan, tahun 2013 jumlah penyandang HIV meningkat menjadi 401 orang terbagi atas 273 laki-laki dan 128 perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Penyandang HIV Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah	
	L	P
2010	223	131
2011	na	na
2012	na	na
2013	273	128
2014	na	na

Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2015

e. Penyandang AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi HIV telah merupakan penyebab AIDS. Tingkat

HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS.

Penyandang AIDS di Kota Bekasi tahun 2010 sebanyak 39 laki-laki dan 31 perempuan, tahun 2014 jumlah penyandang AIDS meningkat menjadi 101 laki-laki dan 32 perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Jumlah Penyandang HIV Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah	
	L	P
2010	39	31
2011	na	na
2012	na	na
2013	89	34
2014	101	32

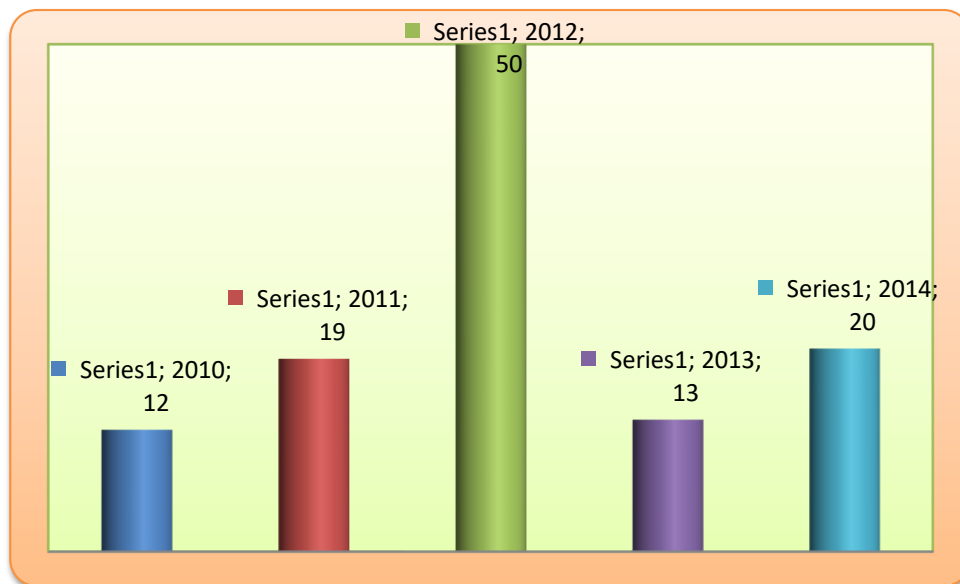
Sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2015

8. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Jumlah Ormas

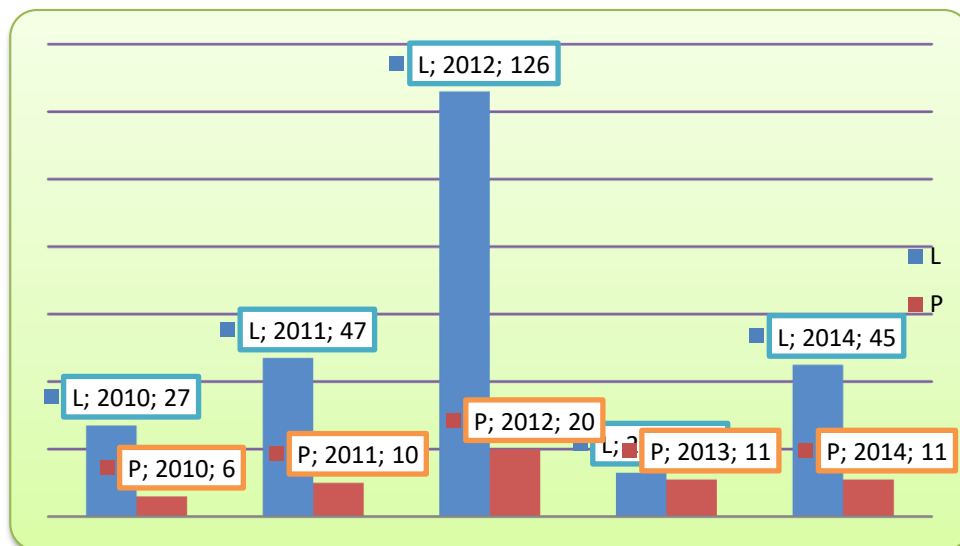
Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Jumlah ormas di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana tahun 2010 jumlah ormas sebanyak 12 ormas, meningkat mencapai 50 ormas di tahun 2012. Pada tahun 2014 jumlah ormas menurun menjadi 20 ormas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.15.
Jumlah Ormas di Kota Bekasi Tahun 2010-2014
Sumber: Kesbangpollinmas Kota Bekasi Tahun 2015

Sementara itu untuk jumlah pengurus ormas tahun 2010 sebanyak 33 orang terbagi atas 27 laki-laki dan 6 perempuan. Tahun 2012 jumlah pengurus ormas sebanyak 146 orang, terbagi atas 126 laki-laki dan 20 perempuan. Tahun 2014 jumlah pengurus ormas sebanyak 56 orang terbagi atas 45 laki-laki dan 11 perempuan. Dalam menempati jabatan strategis didalam sebuah organisasi nampak kesenjangan gender dimana kepengurusan sebuah organisasi lebih didominasi oleh kelompok laki-laki. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan persepsi di masyarakat yang melebelkan perempuan kurang cakap dalam memimpin sebuah organisasi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

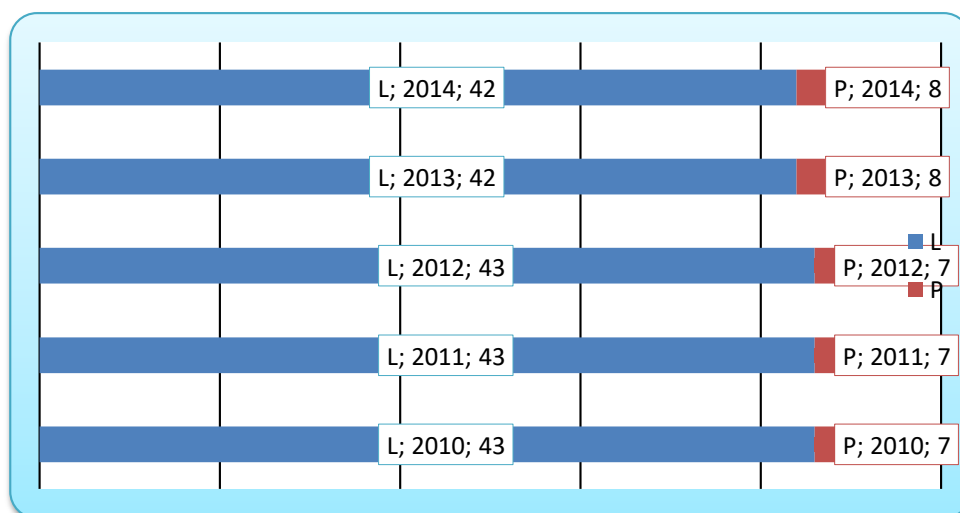


Grafik 3.16.
Jumlah Pengurus Ormas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

Sumber: Kesbangpollinmas Kota Bekasi Tahun 2015

b. Persentase Partisipasi Perempuan Di Legislatif (anggota dewan)

Partisipasi perempuan pada lembaga legislatif tahun 2010-2012 sebesar 14%, sedangkan tahun 2013-2014 sebesar 16%. Persentase ini belum dapat memenuhi undang-undang yang menyatakan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

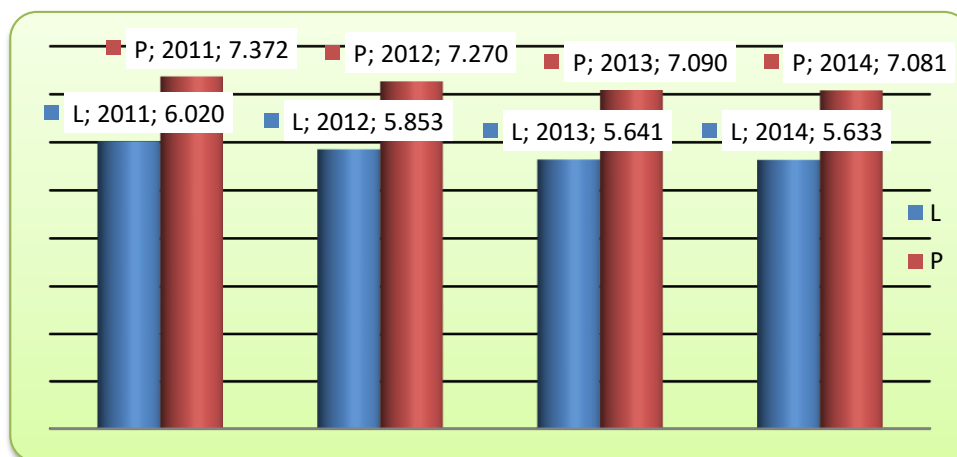


Grafik 3.17.
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2015

c. Jumlah PNS (orang)

Jumlah PNS di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang menurun. Tahun 2011 jumlah PNS di Kota Bekasi sebanyak 13.392 orang terbagi atas 6.020 laki-laki dan 7.372 perempuan. Tahun 2014 menurun menjadi 12.714 orang, terbagi atas 5.633 laki-laki dan 7.081 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



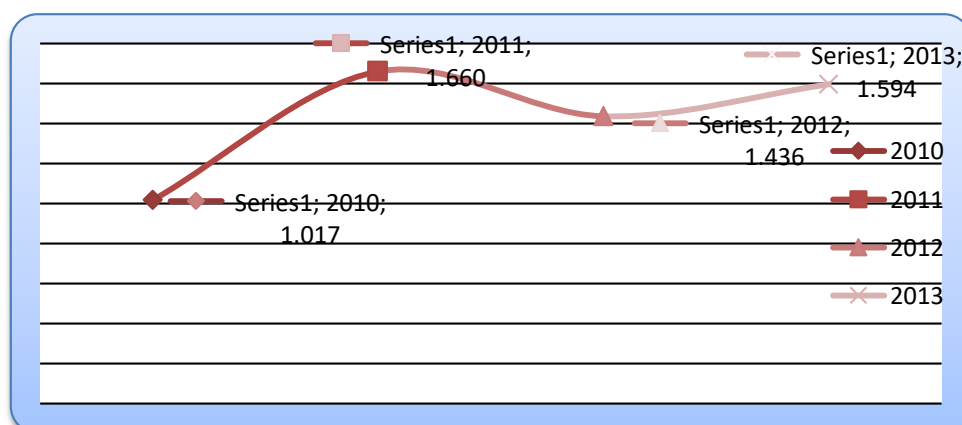
Grafik 3.18.

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014

Sumber: BKD Kota Bekasi Tahun 2015

d. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Jumlah penghuni lapas di Kota Bekasi mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2010 jumlah penghuni lapas sebanyak 1.017 orang laki-laki. Tahun 2012 meningkat menjadi 1.660 orang laki-laki. Tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan menjadi 1.594 orang laki-laki. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.19.
Jumlah Penghuni Lapas Kota Bekasi Tahun 2010-2013

9. Pemberdayaan Masyarakat

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. (Departemen Kesehatan RI. 2006). Jumlah posyandu aktif di Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2010-2014. Tahun 2010 jumlah posyandu aktif sebanyak 568 unit, tahun 2014 meningkat menjadi 865 unit. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16.
Jumlah Posyandu di Kota Bekasi Tahun 2010-2014

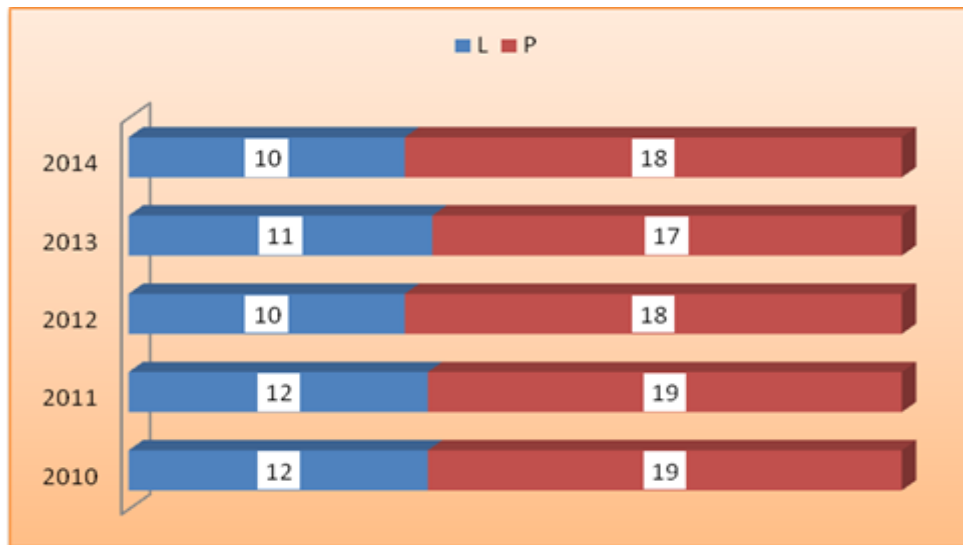
Tahun	Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu Tidak Aktif
2010	568	932
2011	629	877
2012	747	775
2013	772	766
2014	865	678

Sumber: Kapermas Kota Bekasi Tahun 2015

10. Kearsipan

Arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dijelaskan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pengelolaan kearsipan di suatu daerah diperlukan arsiparis/pengelola arsip. Jumlah pengelola arsip di Kota Bekasi selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2010 jumlah SDM pengelola arsip sebanyak 31 orang terbagi atas 12 laki-laki dan 19 perempuan. Tahun 2014 menurun menjadi 28 orang terbagi atas 10 laki-laki dan 18 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



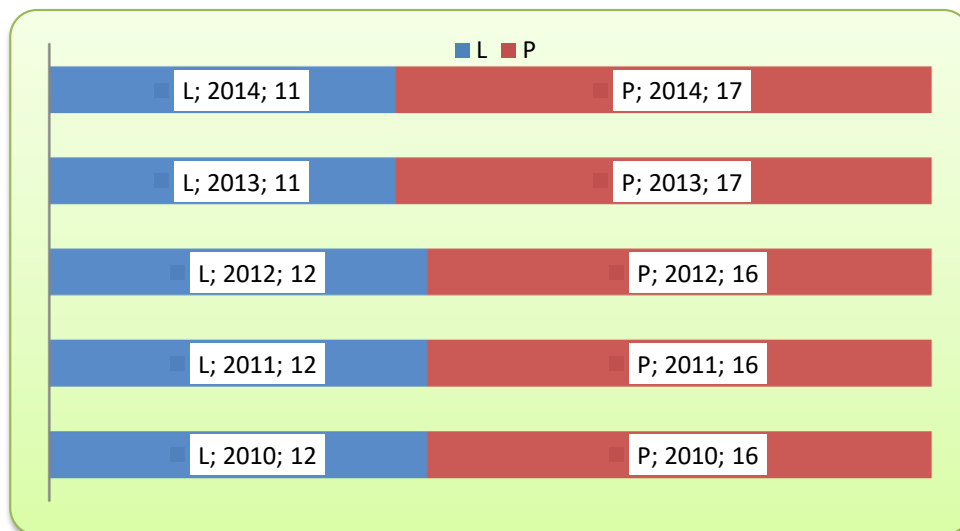
Grafik 3.20.
Jumlah SDM Pengelola Arsip di Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010-2014

Sumber: Bapusipda Kota Bekasi Tahun 2015

11. Perpustakaan

Menurut UU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

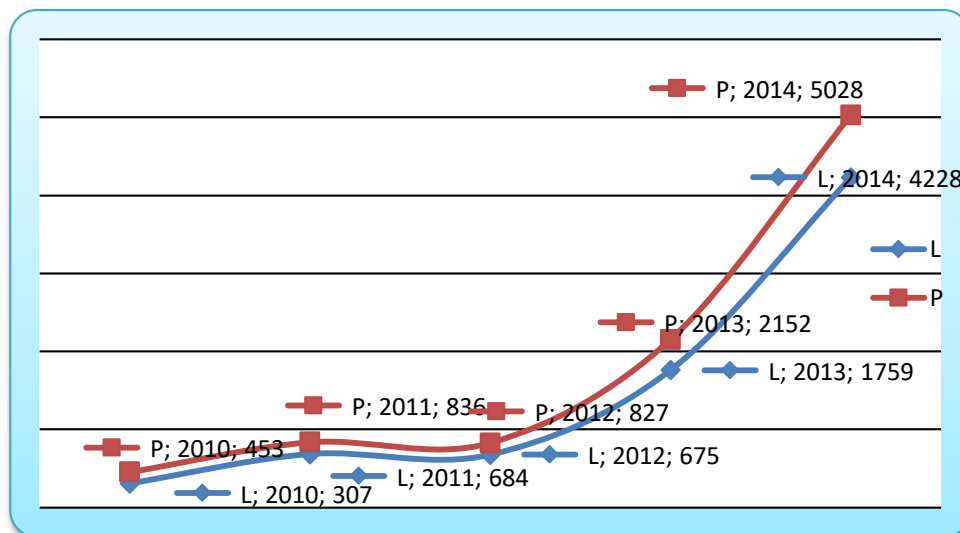
Dalam pengelolaan perpustakaan di suatu daerah diperlukan pustawan atau pengelola perpustakaan. Jumlah pengelola perpustakaan di Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir sebanyak 28 orang. Perkembangan jumlah pengelola perpustakaan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Grafik 3.21.
Jumlah Pengelola Perpustakaan di Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014

Sumber: Bapusipda Kota Bekasi Tahun 2015

Indikator keberhasilan pelayanan perpustakaan salah satunya ditunjukkan dari peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tajam. Tahun 2010 jumlah 760 orang terbagi atas 407 laki-laki dan 453 perempuan. Tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat menjadi 9.256 orang, terbagi atas 4.228 orang laki-laki dan 5.028 orang perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.22.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010-2014
Sumber: Bapusipda Kota Bekasi Tahun 2015

BAB IV

PEMANFAATAN DATA GENDER

A. Isu-isu Gender Kota Bekasi

Beberapa isu gender yang dapat diambil dari pelaksanaan pengumpulan data gender di Kota Bekasi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya angka harapan hidup laki-laki dibandingkan perempuan (L=68,13 tahun, P=72,07 tahun);
2. Adanya kesenjangan dalam capaian rata-rata lama sekolah (L=11,34 tahun, P=10,34 tahun);
3. Tingginya ketimpangan sumbangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan (L=72,60%, P=27,40%);
4. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam legislatif (17%);
5. Adanya ketimpangan jumlah guru laki-laki dan perempuan khususnya pada jenjang pendidikan usia dini (L=107 orang, P=2.326 orang);
6. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan (22 kasus), bayi, dan balita (47 kasus);
7. Belum optimalnya cakupan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (84,9%);
8. Belum optimalnya cakupan K1 dan K4 (92,8% dan 85,5%);
9. Tingginya kasus kekerasan pada anak (105 kasus) dan kasus KDRT (138 kasus);
10. Rendahnya kemauan laki-laki untuk ber-KB (19.760 laki-laki berbanding 351.447 perempuan);
11. Tingginya jumlah laki-laki yang menderita HIV dan AIDs;
12. Rendahnya komposisi perempuan dalam kepengurusan ormas (L=45, P=11);
13. Rendahnya minat laki-laki untuk mengunjungi perpustakaan (L=4.228, P=5.028).

B. Pemanfaatan Data Gender Dalam Gender Analysis Pathway (GAP)

GAP memberi perspektif baru, yaitu perspektif gender yang melihat permasalahan dan penanganannya serta pengukurannya dari kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Nilai dan perilaku yang diubah adalah pendekatan lama yang bersifat netral, yang berasumsi bahwa kebijakan, program dan kegiatan dimaksudkan untuk masyarakat; tetapi mengabaikan kenyataan yang

”tersembunyi” akan adanya perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dasarnya *gender stereotype*.

GAP merupakan alur yang logis dan konsisten. Aplikasikan GAP, memberi perspektif baru yang harus dilalui dalam keseluruhan siklus perencanaan, dimulai dari mereformulasikan tujuan (kebijakan, program, kegiatan), memetakan situasi sebagai pembuka wawasan, mengidentifikasi isu (gender) yang harus dicermati serta program kegiatan untuk merespon permasalahan sampai dengan indikator yang akan dipakai.

GAP membangun komunikasi dan kerjasama yang partisipatif. GAP memberi ruang untuk pihak lain (eksekutif, legislatif dan masyarakat madani) berpartisipasi dan memberi masukan; sehingga proses perencanaan dapat mempertimbangkan dan kemudian mengakomodasi kebutuhan, kepentingan serta pengalaman berbagai pihak, termasuk perempuan, yang selama ini terabaikan. Perilaku yang diubah di sini adalah proses perencanaan pembangunan tidak lagi menjadi ranah rencana semata.

Melalui analisis gender akan dapat ditemukannya isu gender yang selama ini dianggap sebagai sesuatu hal yang „biasa” dan „kodrati”, padahal dasarnya adalah pelabelan berdasarkan atas jenis kelamin (*gender stereotype*). *Gender stereotype* ini sering terbawa ke dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, atau ketika mengkonstruksi perencanaan, sehingga menghasilkan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak sensitif/responsif terhadap isu-isu gender. Oleh sebab itu, penanganan isu gender (yang menyangkut: kebutuhan, kepentingan, pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki) dalam proses perencanaan kebijakan, program, kegiatan pembangunan menjadi sangat penting dan perlu diakomodasi.

Perencanaan pembangunan responsif gender adalah perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, pengalaman yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan itu. Analisis gender dilakukan di 3 (tiga) tingkatan. Pertama, di tingkat penyusunan program; kedua, di tingkat internal lembaga/satuan kerja; dan ketiga, di tingkat pelaksanaan, dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama penyebab kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?

2. Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
3. Faktor partisipasi. Bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan dan dalam mengambil keputusan?
4. Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan?

Piranti analisis gender GAP menurut Bappenas dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah.

1. Langkah 1

- a. Menetapkan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat. Pastikan Wajib dipastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program dan atau (satu atau lebih) kegiatan.
- b. Periksa rumusannya, apakah responsif terhadap isu gender, yaitu isu yang menceminkan kebutuhan, kepentingan dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang bisa berbeda. Karena kebijakan/program/kegiatan yang netral (netral gender), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.
- c. Perjelas dan pertajam tujuan yang ingin dicapai. Kalau memilih kebijakan yang akan dianalisis, maka yang akan diacu adalah tujuan dari kebijakan tersebut; demikian pula halnya apabila yang dipilih adalah program atau kegiatan. Perhatikan juga kurun waktu pencapaian tujuan, misalnya apakah tujuan akan dicapai dalam waktu satu tahun, lima tahun, atau yang lain.

2. Langkah 2

- a. Menyajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender.
- b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik, data kualitatif, hasil kajian, hasil pengamatan, dan/atau kearifan local (local wisdom).
- c. Data pembuka wawasan dapat diperoleh dari: untuk program baru: hasil baseline survey dan atau analisis situasi yang berkaitan dengan tujuan yang akan dianalisis. Contoh: Program: Upaya Kesehatan; Sub-program:

Making Pregnancy Saver. Rumusan: Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2014 diharapkan cakupan pelayanan ante-natal meningkat menjadi 90%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75%, cakupan pelayanan post-natal meningkat menjadi 90%. 7 Untuk program yang sudah berjalan: analisis situasi dan ditambah dengan hasil program yang (telah atau sedang) berjalan.

- d. Bila tidak tersedia data terpilah dapat diperoleh melalui FGD (focus group discussion) atau *rapid assessment*.
3. Langkah 3,4, dan 5 adalah menemukan isu gender apakah di proses perencanaan (Langkah 3), internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada tahap pelaksanaan (Langkah 5).
 - a. Langkah 3 Periksa dan analisis lebih lanjut data pembuka wawasan (Langkah 2) apa yang menyebabkan terjadinya isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan; dan Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.
 - b. Langkah 4 melihat apakah internal lembaga/budaya organisasi menyumbang terhadap terjadinya isu gender, misalnya: produk hukum, pemahaman personil unit kerja tentang gender, *political will* dari pengambil kebijakan (berkaitan dengan prioritas program, dan anggaran)
 - c. Langkah 5 melihat dan menganalisis apakah (a) pelaksana program tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang jadi target program; dan (b) kondisi masyarakat sasaran (target group) masih belum kondusif (patriarki, stereotype, dan isu gender lainnya).
 - d. Langkah 6 Setelah menemukan isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan mengaitkan dengan tujuan semula maka

- dilakukan perumusan kembali (reformulasi) tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
- e. Langkah 7 Setelah menemukenali isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan mengacu pada reformulasi tujuan maka disusun rencana aksi yang responsif gender.
 - f. Langkah 8, menetapkan base-line yaitu keadaan yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan (progres) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah responsif gender.
 - g. Langkah 9 menetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan bahwa kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang. Memperlihatkan perubahan nilai dan perilaku pada para perencana kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga dan di masyarakat. Memperlihatkan perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, di internal lembaga, dan/atau di masyarakat.

Contoh penggunaan analisis gender dengan GAP.

Analisis GAP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/	Data Pembuka	Isu Kesenjangan Gender			Kebijakan ke Depan		Monitoring Program/ Kegiatan	
Program/ Kegiatan yang akan dianalisis; identifikasi tujuan yang ingin dicapai		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	Sebab Kesenjangan eksternal	Reformulasi Kebijakan &	Tujuan Rencana Aksi	Base-line	Indikator Gender
		Mengacu pada data pembuka wawasan, dg memperhatikan ke-4 faktor kesenjangan (akses, kontrol, partisipasi, manfaat)	Fokus pada sebab internal lembaga (UU, peraturan/kebijakan/ proses perencanaaan, pemahaman unit kerja ttg gender)	Fokus pada sebab eksternal lembaga dan pada proses implementasi di masyarakat	Fokus pd bgm mereformulasi tujuan dg memperhitungkan isu dan kesenjangan gender yg teridentifikasi	Fokus pd macam kegiatan utk menghilangkan /mengurangi kesenjangan gender	Memilih keadaan yg akan dipakai utk mengukur progres	Tanda/ ukuran utk memperlihatkan bahwa kesenjangan gender hilang/ berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program : Upaya Kesehatan Subprogram : Making Pregnancy Saver Rumusan : Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan	- Angka Kematian Ibu tinggi - Unmet need KB tinggi - Antenatal Care rendah - Kehamilan dengan kondisi 4 T tinggi	Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan kurang karena keputusan untuk memanfaatkan pelayanan ada di tangan suami/keluarga	Kegiatan penyuluhan dan pelayanan kehamilan di Posyandu hanya disediakan untuk perempuan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman laki-laki	Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pertolongan kehamilan dan persalinan oleh dukun lebih menguntungkan daripada oleh bidan atau tenaga kesehatan	Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2014 diharapkan cakupan pelayanan antenatal	Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi termasuk kepada lakilaki/suami.	Tingkat kepesertaan laki-laki dalam pengaturan kehamilan melalui KB pada tahun 2002 hanya 2 %	Tingkat kepesertaan laki-laki dan perempuan dalam pengaturan kehamilan melalui KB (pada tahun tertentu setelah 10 (AKI) dengan mendekatkan pelayanan kesehatan

maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %,	• Komplikasi obstetri yang ditangani rendah • Pengetahuan laki-laki tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi rendah	• Akses laki-laki terhadap informasi tentang kehamilan dan persalinan kurang, termasuk yang risiko tinggi.	tentang kehamilan risiko tinggi, dan perannya dalam mendampingi isterinya yang kehamilannya berisiko tinggi juga kurang sekali.		meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, dengan lebih meningkatkan keterlibatan laki-laki/suami			maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, Antenatal Care rendah 4. Kehamilan dengan kondisi 4 T tinggi 5. Komplikasi obstetri yang ditangani rendah 6. Pengetahuan laki-laki tentang kehamilan
---	--	--	---	--	--	--	--	--

								dan persalinan risiko tinggi rendah memanfaatkan pelayanan ada di tangan suami/keluarga. Akses laki-laki terhadap informasi tentang kehamilan dan persalinan kurang, termasuk yang risiko tinggi. perempuan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman laki-laki tentang kehamilan risiko tinggi, dan perannya dalam mendampingi isterinya yang kehamilannya berisiko tinggi juga kurang sekali. dukun lebih menguntungkan daripada oleh bidan
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								atau tenaga kesehatan kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 %, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 %, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, dengan lebih meningkatkan keterlibatan laki - laki/suami dilaksanak
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Selain model sebagaimana tersebut diatas, dapat pula dengan model sebagai berikut :

1. Tuliskan nama SKPD, Program dan Kegiatan. Lakukan penelaahan terhadap tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;
2. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada. Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi.
3. Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat), yaitu :
 - a. **Akses:** apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan untuk memberikan akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
 - b. **Partisipasi: apakah** keikutsertaan/suara masyarakat, terutama kelompok perempuan atau laki-laki (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/ terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. **Kontrol: apakah** perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) yang setara terhadap sumber-sumber daya pembangunan (informasi, pengetahuan, kredit, dan sumber daya lainnya) bagi perempuan dan laki-laki.
 - d. **Manfaat:** apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan utk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki – laki.
4. Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :
 - a. Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya

persepsi), mekanisme kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?

- b. Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang focus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi.
- c. Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;
- d. Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;
- e. Rumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil output (keluaran) dan outcome (hasil) secara kuantitatif.

Matrik Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP)

BARIS 1	SKPD		
	Program		
	Kegiatan		
	Tujuan Kegiatan		
BARIS 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		
BARIS 3	Isu Gender	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	Akses : Kontrol /Kewenangan : Partisipasi : Manfaat :
BARIS 4	Faktor Penyebab	Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	
		Sebab Kesenjangan Eksternal	
BARIS 5	Tujuan Responsif Gender		
BARIS 6	Rencana Aksi		
BARIS 7	Pengukuran Hasil	Output	• Indikator Kinerja • Target Kinerja
		Outcome	• Indikator Kinerja • Target Kinerja
		Dampak	• Indikator Kinerja • Target Kinerja

C. Integrasi Gender Dalam Dokumen Perencanaan

1. Integrasi Gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa RPJMD memuat:

- visi, misi, dan program kepala daerah;
- arah kebijakan keuangan daerah;
- strategi pembangunan daerah;
- kebijakan umum;

- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Integrasi gender dalam RPJMD dapat dilakukan dengan pola pikir penyusunan rancangan awal yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Struktur RPJMD Responsif Gender

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
• Pengolahan Data dan Informasi • Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah	Pendahuluan : Gambaran Umum Kondisi Daerah.	• Memasukkan re-gulasi PUG ke dalam dasar hu-kum penyusunan RPJMD. • Memasukan data kesenjangan yang menggambarkan aspek demografi, kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing. • Analisis gambaran umum menggambarkan kesenjangan gender tiap urusan.
Analisis Pengelolaan Ke-uangan Daerah serta Ke-rangka Pendanaan	Gambaran pe-ngelolaan ke-uangan daerah serta kerangka pendanaan.	Memasukan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah.
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.	Analisis isu stra-tegis, visi, misi, tujuan dan sa-saran pemba-ngunan.	Memasukan isu ke-senjangan dan ke-tidakadilan gender melalui dimensi : akses, partisipasi, kontrol, serta man-faat dalam peru-musan masalah, termasuk faktor penyebabnya, men-jadi isu strategis.
Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Isu-isu Strategis.	Memasukan isu gender sebagai isu strategis yang ada di RPJMD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender
Perumusan Penjelasan Visi, Misi	Visi dan misi.	Memasukan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ke-tidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.
• Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan • Perumusan Kebijakan Umum dan Program Daerah.	• Strategi dan arah kebijakan. • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.	• Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan responsif gender; • Merumuskan kebijakan umum responsive gender; • Menentukan program yang responsive gender.
Perumusan Indikasi Ren-cana Program Prioritas Pembangunan Beserta Kebutuhan Pendanaan	Indikasi Ren-cana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah.	• Memasukkan pagu indikatif program termasuk untuk program responsif gender; • Memasukan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program sesuai hasil GAP.

2. Integrasi Gender dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Integrasi Gender dalam Renstra SKPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Integrasi gender dalam Renstra SKPD dengan menggunakan metoda GAP dapat mengikuti struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel berikut :

Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender
Pengolahan Data dan In-formasi	Gambaran Umum Kondisi Pelayanan SKPD	Memasukan data kesenjangan terpi-lah gender berdasar-kan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemam-puan yang menjadi fakta dalam pelaya-nan SKPD.
- Analisis Gambaran Pelayanan SKPD - Analisis Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD :	Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	Memasukan faktor penyebab kesen-jangan dan ketidak-adilan gender yang merupakan akar persoalan ketidak-adilan gender dalam pelayanan SKPD se-bagai isu strategis.
Perumusan Penjelasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pelayanan SKPD	Visi, Misi, Tu-juan dan Sa-saran	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenja-ngan dan ketidak-adilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan	Kebijakan dan Program	Memasukan renca-na aksi responsif gender dengan tujuan akhir men-capai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang di-analisis.
Perumusan Rencana Kegiat-an, Indikator Kinerja, Ke-lompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	Memasukan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa <i>output</i> dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan <i>outcome</i> (hasil atas pengaruh adanya <i>output</i>) sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pe-layanan yang meng-hapuskan kesen-jangan dan ketidak-adilan gender.

3. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) SKPD

Integrasi gender dalam RKPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender
• Pengolahan Data dan Informasi : • Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah • Evaluasi Kinerja Tahun Lalu • Analisis Masalah Pem-bangunan :	Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu.	• Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah, serta data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun Lalu; • Memasukkan Kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya, baik internal dan eksternal ber-dasarkan data kesenjangan ca-paian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pem-bangunan.
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah	Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan	Memasukkan data kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang ber-kontribusi paling be-sar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelom-pok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.
• Perumusan Prioritas dan Sasaran Pem-bangunan, berisi: • Penetapan Program Prioritas dan Pagu Indikatif		Memasukkan ren-cana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya mencapai keadilan dan kese-taraan gender se-suai issu yang di-analisis.

4. Integrasi Gender dalam Renja SKPD

Integrasi gender dalam Renja SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Renja SKPD dapat diikuti tabel sebagai berikut :

Integrasi Gender dalam Dokumen RENJA SKPD

Tahapan Penyusunan Renja	Struktur Renja	Langkah Integrasi Gender
- Persiapan Penyusunan Renja SKPD - Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD - Pelaksanaan Forum SKPD	BAB I. PENDAHULUAN	Data pilah
	BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	Hasil Evaluasi pelaksanaan PPRG
	BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	Tujuan dan sasaran responsif gender
	BAB IV. PENUTUP	

5. Integrasi Gender dalam Musrenbang

a. Isu Strategis

Mengintegrasikan isu-isu gender terkait akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD pada GAP dalam rumusan isu-isu strategis pada musrenbang.

b. Langkah Integrasi yang Dilakukan Mencakup Perbaikan-Perbaikan pada Level Substantif pada pendekatan dan kualitas deliberasi dalam proses musrenbang, antara lain :

- 1) Memberi penghargaan yang sama antara isu yang dilontarkan laki-laki dan perempuan;
- 2) Memberi informasi tindak lanjut yang memadai atas usulan baik laki-laki maupun perempuan.

c. Langkah Integrasi yang Lain Mencakup Perbaikan pada Level Teknis yang memungkinkan keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki di dalam proses musrenbang, antara lain :

- 1) Memastikan distribusi undangan;

- 2) *Setting* tempat dan pemilihan waktu yang memungkinkan keterlibatan perempuan dan laki-laki.

D. Penganggaran Responsif Gender

1. Konsep Anggaran Responsif Gender (ARG)

ARG adalah anggaran yang memberi/ mengakomodasi terhadap 2 hal, yaitu : (1) Keadilan bagi laki laki dan perempuan (dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber sumber daya yang tersedia; (2) Kesetaraan bagi laki laki dan perempuan, terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan dimaksud dapat berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. Bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap laki laki dan perempuan, yang kemudian dianalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan laki laki atau kebutuhan perempuan secara memadai.

2. Karakteristik ARG

Menurut *United Nation Development Fund for Women* (UNIFEM), untuk dapat disebut sebagai anggaran responsif gender harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. Fokus pada kesetaraan gender dan PUG dalam semua aspek penganggaran baik di tingkat nasional maupun lokal;
- c. Meningkatkan keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder perempuan;
- d. Monitoring dan evaluasi belanja pemerintah dilakukan dengan responsif gender;
- e. Meningkatkan efektivitas penggunaan sumber-sumber untuk mencapai kesetaraan gender dan pengembangan SDM;
- f. Menekankan pada prioritas daripada meningkatkan keseluruhan belanja pemerintah;
- g. Melakukan reorientasi dari program-program dalam sektor-sektor daripada menambah angka pada sektor-sektor khusus.

3. Tujuan ARG

- a. Meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki;
- c. Menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

4. Manfaat ARG

a. Manfaat Bagi Pemerintah :

- 1) Sebagai instrumen pemerintah untuk melaksanakan komitmennya dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana telah disepakati secara internasional;
- 2) Fungsi anggaran selain sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- 3) Dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender;
- 4) Gap/kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender (laki-laki maupun perempuan);
- 5) Memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal dan tidak beruntung terhadap alokasi anggaran;
- 6) Terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan serta semakin meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

b. Manfaat Bagi Masyarakat :

- 1) Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi, ketidakefisienan dan korupsi anggaran, serta mengajukan
- 2) alternatif kebijakan baru untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- 3) Mengakui kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan;

- 4) Memperkuat advokasi dalam perubahan anggaran dan inisiatif pemantauan pelaksanaan anggaran untuk warga Negara.

5. Integrasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Anggaran Kinerja

- a. ARG tidak bisa berjalan sendiri, oleh karenanya inisiatif ARG harus diselaraskan dalam framework penganggaran berbasis kinerja;
- b. Penganggaran berbasis kinerja di Indonesia akan terus diimplementasikan, sehingga memberi peluang besar bagi pendekatan dan *tools* ARG untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja;
- c. Dalam kerangka anggaran kinerja, ARG memiliki peran penting karena keberadaan informasi gender dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja, yang disebabkan data pilah memiliki dua peran, yaitu :
 - 1) Mengidentifikasi ketidaksamaan kondisi diantara kelompok penerima layanan;
 - 2) Menegaskan perbedaan dampak dari kebijakan anggaran di antara anggota kelompok masyarakat yang berbeda.

Kriteria kinerja, yang mendasari anggaran berbasis kinerja terdiri atas 3E, yaitu *economy*, *efficiency* dan *effectiveness*. Deskripsi dari ketiga kriteria tersebut adalah :

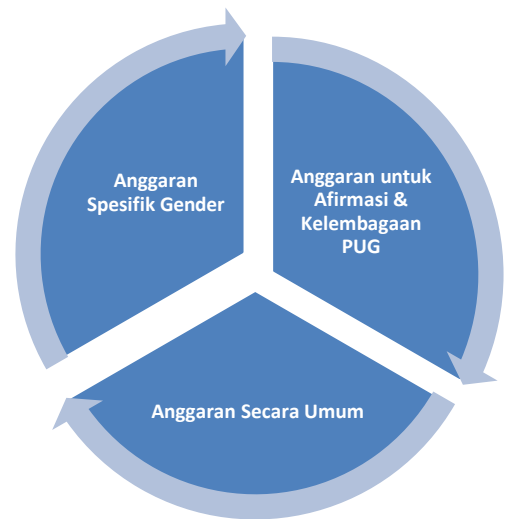
6. Prinsip Anggaran Responsif Gender

- a. ARG bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki laki dan perempuan;
- b. ARG sebagai pola anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan;
- c. ARG bukanlah dasar yang valid untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususnya untuk satu jenis kelamin;
- e. ARG tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% untuk laki laki dan 50 % untuk perempuan;
- f. Tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif gender (ada kegiatan yang netral gender).

7. Kategori Anggaran Responsif Gender

ARG, dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. ***Gender Spesific Expendi-ture*** atau **anggaran khusus target gender**, yaitu anggaran yang menysasar kelompok gender tertentu, diperuntukan guna memenuhi kebutuhan standar dasar khusus laki laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki laki berdasarkan hasil analisis gender. Misalnya : anggaran untuk pelatihan ketrampilan usaha bagi janda miskin, atau penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan, anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. ***Affirmative Action Expenditure*** atau **anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan**, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik. Misalnya : anggaran pendidikan untuk staf perempuan, atau perumusan ulang *job description* jabatan di struktur pemerintahan dengan menghitung kondisi dan kebutuhan perempuan.
- c. ***Mainstream Expenditure*** atau **anggaran yang mengarusutama pada semua bidang pembangunan**. Misalnya : pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan, pembangunan MCK terpisah untuk laki-laki dan perempuan dengan menghitung peran gender yang ada, beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki.



E. Instrumen Anggaran Responsif Gender

1. Pengertian Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/ Gender Budget Statement (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu

gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS pada tingkat *output* harus sudah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain *Gender Analysis Pathway* (GAP)).

GBS yang menerangkan output kegiatan yang responsif gender, merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan (*Terms of Reference/TOR*). Kerangka Acuan Kegiatan/TOR dari suatu *output* kegiatan harus menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan (relevansi) komponen-komponen inputnya terhadap output yang dihasilkan.

2. Tahapan Penyusunan PAG

a. Tahap Analisis Situasi

- 1) Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
- 2) Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
- 3) Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
- 4) Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin.

b. Tahap Penyusunan Kegiatan

- 1) Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
- 2) Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP;
- 3) Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

c. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

- 1) Langkah 1 : Menetapkan Jumlah Input.
 - a) Tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
 - b) Tuliskan komponen input;
 - c) Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- 2) Langkah 2 : Merumuskan Indikator Keluaran.

- a) Tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
 - b) Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/menengah).
- 3) Langkah 3 : Merumuskan Indikator Hasil
- a) Tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah dalam GAP);
 - b) Tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki);
 - c) Tuliskan indikator manfaat;
 - d) Tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
 - e) Lakukan analisis, apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

KOP SKPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD :
TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM				
KEGIATAN				
KODE REKENING				
ANALISIS SITUASI	Data Pembuka Wawasan			
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan 1			
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran			
	SDM			
	Peralatan dan Mesin			
OUTPUT	<u>Indikator Kinerja:</u> <u>Target Kinerja:</u>			
OUTCOMES	<u>Indikator Kinerja:</u> <u>Target Kinerja:</u>			
Semarang, KEPALA SKPD NIP PANGKAT Keterangan : Tanggal pembahasan : Catatan hasil pembahasan: 1. 2. 3.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

J. Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPA

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Responsif Gender

Isi KUA yaitu :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Kerangka Ekonomi Makro
- c. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD)
- d. Bab V Penutup

2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Responsif Gender

Susunan PPAS sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Rencana Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah |
| BAB III | : | Prioritas Belanja Daerah. |
| BAB IV | : | Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan. |
| BAB V | : | Rencana Pembiayaan Daerah. |
| BAB VI | : | Penutup. |

Keterangan :

- Proses penyusunan KUA-PPAS menentukan alokasi untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD;
- GBS yang sudah dipersiapkan sejak penyusunan KUA-PPAS, dapat menjadi dasar mengapa program/kegiatan diperlukan;
- Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan DPRD dalam mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran;
- Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program/kegiatan dalam dokumen KUA-PPAS akan menjadi dasar kuat dalam penyusunan RKA-SKPD yang substansinya harus secara konsisten mengacu pada GBS.

K. RKA SKPD

1. Merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
2. Disesuaikan dari RKA setelah penetapan APBD;
3. Cek kembali rumusan indikator : Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan APBD.

Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Dokumen RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-SKPD 2.2.1	
Provinsi/Kab/Kota:			
Tahun Anggaran:			
Urusan pemerintahan:			
Organisasi:			
Program:			
Kegiatan:			
Lokasi Kegiatan:			
Jumlah tahun n-1 Rp			
Jumlah tahun n Rp			
Jumlah tahun n+1 Rp			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian program			
Masukan			
Keluaran			
Hasil			
Kelompok Sasaran Kegiatan			
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD			
Kode Rekening	Uraian Rincian Penghitungan	Satuan	Harga satuan
	Volume		Jumlah (Rp)
x.x.x.xx.xx			
x.x.x.xx.xx			
x.x.x.xx.xx			
			Jumlah

Kesesuaian program dan kegiatan dengan Renja SKPD

Mengecek konsistensi dan indikator responsif gender dengan kerangka kinerja logis

Apakah kegiatan spesifik, afirmasi, dan peningkatan kapasitas ataupun kegiatan secara umum?

Lokasi kegiatan keterlibatan laki-laki dan perempuan, wilayah dengan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus

Sejauh mana keterlibatan perempuan dan kelompok rentan? Perhatikan juga kasus seperti rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB.

BAB VI

P E N U T U P

RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah. *Kedua* Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan PUG adalah : 1) dukungan politis dari pengambil keputusan, 2) ketersediaan lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah, 3) kapasitas SDM dalam rangka implementasi PUG, 4) ketersediaan data gender, 5) penerapan analisis gender dan integrasi gender dalam perencanaan penganggaran dan 5) dukungan anggaran.

Sistem Data Gender Kota Bekasi Tahun 2014 merupakan langkah tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Data Pilah Gender disusun dengan mengacu pada Indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Data Pilah Gender ini disusun sebagai pedoman bagi perencana di masing-masing SKPD guna mendukung proses pembangunan yang responsive gender. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, data pilah gender dapat berguna untuk,

Sebagai bahan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau disparitas kondisi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif dan responsif terhadap masalah, kebutuhan, dan pengalaman dari masing-masing jenis kelamin (Permeneg PP No. 6 Tahun 2009). Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten untuk menentukan

intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan

PEDOMAN DATA PILAH GENDER

Bagian 1

MEKANISME PENGUMPULAN DATA GENDER

Panduan data gender ini merupakan sistem dan mekanisme tentang cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian data gender yang terkait dengan berbagai bidang pembangunan daerah. Mekanisme dalam proses pengumpulan data gender Kota Bekasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan kebutuhan data gender

Proses penentuan kebutuhan data gender sangat penting terutama dalam kaitannya untuk kepentingan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Penentuan kebutuhan data gender sedapat mungkin dikembangkan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan di tingkat daerah. Penentuan kebutuhan data gender ini diupayakan agar terpilah antara laki-laki dan perempuan, sehingga nantinya dapat digunakan untuk keperluan analisis gender.

Beberapa syarat data yang harus dapat dipenuhi untuk penyusunan profil gender adalah sebagai berikut:

- a. Data dapat tersusun dalam bentuk terpilah menurut jenis kelamin atau sesuai dengan kepentingan pengarusutamaan gender.
- b. Data haruslah akurat, dapat diperoleh secara berkesinambungan.

2. Pengumpulan data gender

Proses pengumpulan data gender dapat dilakukan secara bertingkat maupun secara langsung pada satu sumber. Beberapa contoh data yang dapat dikumpulkan secara bertingkat antara lain data peserta KB aktif, dan data peserta KB baru, yang diperoleh secara berjenjang dari Puskesmas kemudian dilaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Beberapa data yang diperoleh langsung dari satu sumber yaitu data Jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Proses pengumpulan data gender dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Menyusun formulir pengumpulan data gender sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Kerja PUG menyebarkan formulir pengumpulan data gender kepada SKPD atau lembaga terkait.
- c. SKPD atau lembaga terkait menyediakan atau mengumpulkan dan mengkompilasi data dari sumber pada tingkatan yang lebih rendah.
- d. SKPD melakukan pengelolaan gender dalam sistem yang berkesinambungan, dan menyajikannya secara menyatu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profil SKPD masing-masing.
- e. Pengumpulan data gender tahunan ini diharapkan dapat terkumpul secara periodik.

3. Penyajian data gender

Penyajian data gender dapat berbentuk buku profil gender, data digital, website ataupun yang lain. Penyajian data gender dapat berupa tabel, grafik/diagram, maupun peta sebaran per kecamatan, sehingga terlihat menarik bagi para pembaca. Grafik lebih memudahkan dalam mengamati persebaran atau perkembangan data. Berbagai bentuk diagram atau grafik dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti: Diagram Garis (*line chart*), Diagram Batang (*bar chart*), Diagram Lingkaran (*pie chart*) dan sebagainya.

Bagian 2

JENIS DATA UNTUK PENYUSUNAN PROFIL GENDER

Penyediaan data gender Kota Bekasi dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Penyediaan data gender juga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pada tingkat daerah. Pada tahun-tahun mendatang dapat ditambahkan beberapa indikator sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga profil gender dapat tersusun secara lengkap dan komprehensif.

Variabel dan jenis data yang dikumpulkan untuk keperluan penyusunan profil gender Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

- a. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)
- b. Angka kematian ibu melahirkan
- c. Penyebab kematian ibu melahirkan
- d. Cakupan pertolongan persalinan
- e. Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas
- f. Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil
- g. Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
- h. Ibu Nifas yang mendapat Vitamin A
- i. Jumlah dokter
- j. Jumlah tenaga medis
- k. Persentase balita gizi buruk
- l. Kasus aborsi pada remaja putri
- m. Penderita HIV/AIDS
- n. Cakupan peserta KB aktif
- o. Usia perkawinan pertama
- p. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

2. Pendidikan

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
- b. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
- c. Angka Putus Sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
- d. Angka Kelulusan (AL) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA
- e. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- f. Angka Melek Huruf (AMH).
- g. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan
- h. Rata-rata lama sekolah
- i. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- j. Jumlah pengunjung perpustakaan

3. Ketenagakerjaan

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan
- c. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
- d. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
- e. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

- f. Tingkat pengangguran terbuka
- g. Perkiraan tingkat daya beli (purchasing power parity)
- h. Pencari kerja
- i. Pencari kerja yang ditempatkan
- j. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
- k. Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
- l. Pekerja di sektor formal
- m. Pekerja di sektor informal
- n. Perempuan pekerja profesional dan manajerial
- o. Pekerja tak dibayar (unpaid worker)
- p. Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan.
- q. Pekerja Peserta Jamsostek / K3
- r. Pekerja yang Terkena PHK

4. Urusan Penunjang

- 1) Keterwakilan Legislatif
 - a. Keterwakilan di Lembaga Legislatif
 - b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Keterwakilan di Lembaga Yudikatif
 - a. Jaksa
 - b. Hakim
 - c. Polisi
- 3) Keterwakilan di Lembaga Eksekutif
 - a. PNS menurut Jabatan Struktural
 - b. PNS menurut Jabatan Fungsional
 - c. PNS menurut Pangkat dan Golongan
 - d. PNS menurut pendidikan
 - e. Camat
 - f. Kepala Desa/Lurah

5. Bidang Hukum

- a. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
- b. Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)
- c. Jumlah PKL berdasarkan jenis kelamin

6. Sosial

- a. Anak Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- d. Anak Jalanan
- e. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
- f. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
- g. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- h. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- i. Korban Tindak Kekerasan
- j. Korban Trafficking
- k. Lanjut Usia Terlantar
- l. Tuna Susila
- m. Pengemis
- n. Gelandangan
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
- p. Korban Penyalahgunaan Napza

- q. Keluarga Fakir Miskin
- r. Penyandang Disabilitas
- s. Pemulung
- t. Kelompok Minoritas
- u. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- v. Komunitas Adat Terpencil
- w. Korban Bencana Alam
- x. Korban Bencana Sosial
- y. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- z. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Korban kekerasan menurut:

- a. Umur: Anak (0<18 Tahun), Remaja (18-<25 Tahun); dan Dewasa (25 Tahun ke atas)
- b. Tingkat Pendidikan
- c. Status Pekerjaan
- d. Status Perkawinan
- e. Jenis Kekerasan
- f. Tempat Kejadian
- g. Jenis Pelayanan yang diberikan
- h. Frekuensi Kekerasan

2) Pelaku kekerasan menurut:

- a. Tingkat Pendidikan
- b. Status Pekerjaan
- c. Hubungan dengan Korban
- d. Kebangsaan

8. Lingkungan Hidup

- a. Jumlah kader Lingkungan
- b. Jumlah Korban akibat kerusakan lingkungan

9. Pekerjaan Umum

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
- b. Jumlah penerima manfaat

10. Penataan Ruang

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Jumlah penyapu jalan
- c. Jumlah pengangkut sampah
- d. Jumlah Petugas taman
- e. Jumlah juru kunci
- f. Jumlah penerima rumah kumuh
- g. Jumlah jumlah pemilik sanitasi layak

11. Perencanaan Pembangunan

- a. Jenis Dokumen responsif Gender
- b. Jumlah perencanaan
- c. Jumlah evaluator

12. Perumahan

- a. Jumlah penerima rumah kumuh
- b. Jumlah jumlah pemilik sanitasi layak

13. Kepemudaan Dan Olahraga

- a. Jumlah atlit
- b. Jumlah pelatih
- c. Jumlah atlit baru
- d. Jumlah atlit berprestasi nasional, daerah, internasional

14. Penanaman Modal

- a. Jumlah memilik modal
- b. Jumlah pegawai

15. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
- c. Keanggotaan Koperasi

16. Kependudukan Dan Catatan Sipil

- a. Kepemilikan KTP
- b. Kepemilikan KK
- c. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia
- d. Kepemilikan akta kelahiran
- e. Anak usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran

17. Ketahanan Pangan

- a. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, perikanan, kehutanan.
- b. Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan
- c. Jumlah kelompok tani
- d. Jumlah kelembagaan tani lainnya
- e. Jumlah PPL

18. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera**1) Keluarga Berencana**

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Total Fertility Rate (TFR)
- c. Prevalensi Peserta KB Aktif (%)
- d. % Laki-laki ber KB
- e. Persentase Unmetneed (%)
- f. Jumlah Peserta KB Baru
- g. Jumlah Peserta KB Drop Out
- h. Persentase Keluarga Ikut KB

2) Keluarga Sejahtera

- a. Keluarga Pr KS
- b. Keluarga KS I
- c. Keluarga KS II, III Keatas

19. Perhubungan

- a. Jumlah zona selamat
- b. Jumlah pengemudi
- c. Jumlah pemilik usaha perhubungan

20. Komunikasi Dan Informatika

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Jumlah media sosialisasi
- c. Jumlah penyuluh

21. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik
 - 1) Keanggotaan Partai Politik
 - 2) Pengurus Harian Parpol
 - 3) Kaukus Perempuan Politik
 - 4) Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
 - 5) Serikat Pekerja
- c. Keterwakilan dalam organisasi pemuda
- d. Keterwakilan dalam organisasi olahraga
- e. Persentase PKK aktif

22. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Jumlah Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- c. Jumlah kader Posyandu
- d. Jumlah penderita HIV/AIDs
- e. Jumlah pengurus lembaga desa
- f. Jumlah anggota Ormas : PKK, RT, RW, Lembaga Adat, Karang Taruna, lembaga kemasyarakatan lainnya.

23. Kebudayaan

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Jumlah seniman
- c. Jumlah pelatih seni
- d. Jumlah pekerja seni

24. Perpustakaan

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Jumlah Pengelola Perpustakaan
- c. Jumlah pengunjung
- d. Jumlah kelompok belajar

25. Perindustrian

- a. Jumlah Pelaku usaha industri

- b. Jumlah pekerja industri
- c. Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan
- d. Jumlah Pemilik Los di Pasar
- e. Jumlah Pemilik Warung
- f. Jumlah Pemilik Kios

26. Perdagangan

- a. Jumlah Pelaku usaha perdagangan
- b. Jumlah pekerja perdagangan

27. Peternakan

- a. Anggota Kelompok Tani Ternak
- b. Jumlah PPL

28. Pariwisata

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, golongan, jabatan struktural.
- b. Kelompok sadar wisata
- c. Jumlah pemandu wisata

29. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

- a. Kesehatan: Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Gugus Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Satgas Revitalisasi GSI, Kelompok Suami Antar Jaga
- b. Pendidikan: Pokjatap Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP), Gugus Tugas PBAP, Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
- c. Ekonomi: Desa Prima; P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan, Kelompok Tani/Nelayan Perempuan
- d. Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, Focal Point Gender
- e. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban
- f. Forum Seni Budaya dan Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan
- g. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan
- h. Kearifan lokal untuk pemberdayaan perempuan
- i. Peraturan Daerah dan Kebijakan/Program/Kegiatan yang responsif gender
- j. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
- k. Peraturan Daerah Dan Kebijakan/Program/Kegiatan tentang perlindungan perempuan
- l. Pusat Konsultasi Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum
- m. Pusat Krisis Terpadu (PKT)
- n. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
- o. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

- p. Pusat Pemulihan Trauma (Trauma Center)
- q. Pusat Penanganan Krisis Perempuan (Women Crisis Center)
- r. Rumah Aman (Shelter)
- s. Rumah Singgah
- t. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
- u. Panti Asuhan Anak
- v. Lembaga Pemasyarakatan Anak

Bagian 3

FORMULIR ISIAN PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan daftar jenis data gender pada bagian sebelumnya, maka dalam proses pengumpulan data disusun formulir pengumpulan data, sehingga dapat terkumpul secara cepat sesuai dengan format. Formulir isian pengumpulan data ini akan digunakan bagi SKPD maupun lembaga terkait dalam proses pengumpulan data gender. Formulir pengumpulan data gender ini dapat bertambah apabila ada penambahan jenis data sesuai dengan kebutuhan daerah.

Secara lengkap formulir isian pengumpulan data gender untuk keperluan penyusunan profil gender adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan

a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data Angka Harapan Hidup tingkat kota dikumpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Angka Harapan Hidup Kota Bekasi
Tahun 2010-2015

Tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Thn 2010			
Thn 2011			
Thn 2012			
Thn 2013			
Thn 2014			
Thn 2015			

Sumber: Badan Pusat Statistik

b. Angka kematian ibu

Kematian Ibu Melahirkan adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas yang dilaporkan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup tahun yang sama dikalikan dengan 100.000.

Formula:

$$\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu karena hamil, persalinan dan nifas dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 100.000$$

Jumlah Kematian Ibu maternal tingkat kota dikumpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Kematian Ibu Maternal Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup	Kematian Ibu Maternal			Jumlah
			Kematian Ibu Hamil	Kematian Ibu Bersalin	Kematian Ibu Nifas	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	Jumlah thn x					
	AKI thn x					
	AKI thn x-1					
	AKI thn x-2					
	AKI thn x-3					
	AKI thn x-4					
	AKI thn x-5					

Sumber: Dinas Kesehatan

c. Penyebab kematian ibu melahirkan

Data penyebab kematian ibu melahirkan diperlukan untuk mengetahui penyebab kematian ibu melahirkan, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah dalam rangka pengurangan kasus kematian ibu. Data penyebab kematian Ibu maternal tingkat kota dikumpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Jumlah Kematian Ibu Maternal di Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Partus Lama	Infeksi	Hipertensi	Pendarahan	Penyebab lainnya	Total
1.							
2.							
3.							
4.							

No	Puskesmas	Partus Lama	Infeksi	Hipertensi	Pendarahan	Penyebab lainnya	Total
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
	Jumlah thn x						
	Jumlah thn x-1						
	Jumlah thn x-2						
	Jumlah thn x-3						
	Jumlah thn x-4						
	Jumlah thn x-5						

Sumber: Dinas Kesehatan

d. Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan

Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan menggambarkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter. Data cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan tingkat kota dikumpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.
Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Kota Bekasi
Tahun

No	Nama Puskesmas	Jumlah Ibu Melahirkan	Persalinan ditolong Nakes	Persentase (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

No	Nama Puskesmas	Jumlah Ibu Melahirkan	Persalinan ditolong Nakes	Persentase (%)
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

e. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan pelayanan nifas menggambarkan persentase ibu nifas yang memperoleh pelayanan nifas. Cakupan pelayanan nifas tingkat kota dikumpulkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Cakupan Pelayanan Nifas Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas	Jumlah ibu Mendapat Pelayanan Nifas	Persentase (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Nifas	Jumlah ibu Mendapat Pelayanan Nifas	Persentase (%)
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

f. Cakupan Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 merupakan persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan baru ke Posyandu/Puskesmas. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan ke Posyandu/Puskesmas sebanyak empat kali. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 6.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1 dan K4 Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Kunjungan K1		Kunjungan K4	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	Jumlah thn x					
	Jumlah thn x-1					
	Jumlah thn x-2					
	Jumlah thn x-3					
	Jumlah thn x-4					
	Jumlah thn x-5					

Sumber: Dinas Kesehatan

g. Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil

Cakupan imunisasi Tetanus Toxoid menggambarkan persentase ibu hamil yang diimunisasi Tetanus Toxoid. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 7.
Cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil
di Kota Bekasi Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Ibu hamil mendapat Imunisasi TT	
			Jumlah	%
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

h. Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)

Jenis data ini menggambarkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet zat besi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 8.
Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Di Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Fe 1		Fe 3	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
	Jumlah thn x					
	Jumlah thn x-1					
	Jumlah thn x-2					
	Jumlah thn x-3					
	Jumlah thn x-4					
	Jumlah thn x-5					

Sumber: Dinas Kesehatan

i. Ibu Nifas yang mendapat Vitamin A

Jenis data ini menggambarkan persentase ibu nifas yang mendapatkan vitamin A. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 9.
Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Bumil Mendapat Vitamin A.	
			Jumlah	%
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

No	Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Bumil Mendapat Vitamin A.	
			Jumlah	%
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

j. Jumlah Dokter

Jumlah dokter di suatu daerah dapat menggambarkan ketersediaan dokter di wilayah tertentu. Jumlah dokter secara terpisah dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 10.
Jumlah Dokter di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Dokter		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			

No	Kecamatan	Jumlah Dokter		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

k. Jumlah Tenaga medis

Jenis data ini yang menggambarkan jumlah tenaga medis di suatu daerah. Data terpilah tenaga medis dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 11.
Jumlah Tenaga Medis di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

l. Persentase balita gizi buruk

Jenis data ini yang menggambarkan jumlah balita gizi buruk dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 12.
Jumlah Balita Gizi Buruk di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				

No	Kecamatan	Jumlah Balita Gizi Buruk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

m. Kasus Aborsi pada remaja putri

Jenis data ini menggambarkan banyaknya kasus aborsi pada remaja putri yang terjadi di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 13.
Jumlah Kasus Aborsi Pada Remaja Putri Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah kasus Aborsi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
	Jumlah thn x	
	Jumlah thn x-1	
	Jumlah thn x-2	
	Jumlah thn x-3	
	Jumlah thn x-4	
	Jumlah thn x-5	

Sumber: Dinas Kesehatan

n. Penderita HIV/AIDS

Jenis data ini menggambarkan banyaknya penderita HIV/AIDS di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 14.
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penderita HIV/AIDS		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kesehatan

o. Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

Jenis data ini menggambarkan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 15.
Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif					
			PUS KB Aktif		Laki-laki		Perempuan	
			PUS	%	orang	%	orang	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

No	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif					
			PUS KB Aktif		Laki-laki		Perempuan	
			PUS	%	orang	%	orang	%
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Jumlah thn x							
	Jumlah thn x-1							
	Jumlah thn x-2							
	Jumlah thn x-3							
	Jumlah thn x-4							
	Jumlah thn x-5							

Sumber: Dinas Kesehatan/ BP3AKB

p. Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi

Jenis data ini menggambarkan persentase KB aktif menurut jenis kontrasepsi yang digunakan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 16.
Jumlah Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi
Kota Bekasi Tahun

No	Puskesmas	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif								
		IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Obat Vagina	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									

No	Puskesmas	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif								Total
		IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Obat Vagina	
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Kesehatan/ BP3AKB

q. Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru

Jenis data ini menggambarkan jumlah peserta KB baru di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 17.
Jumlah Peserta KB Baru Kota Bekasi
Tahun

No	Puskesmas	Jumlah PUS	Peserta KB Baru					
			PUS KB Baru		Laki-laki		Perempuan	
			PUS	%	orang	%	orang	%
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
	Jumlah thn x							
	Jumlah thn x-1							
	Jumlah thn x-2							
	Jumlah thn x-3							
	Jumlah thn x-4							
	Jumlah thn x-5							

Sumber: Dinas Kesehatan / BP3AKB

r. Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru Menurut Jenis Kontrasepsi

Jenis data ini menggambarkan persentase KB Baru berdasarkan Jenis Kontrasepsi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 18.
Jumlah Peserta KB Baru Menurut Jenis Kontrasepsi

**Di Kota Bekasi
Tahun**

NO	Puskesmas	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Baru								Total
		IUD	MOP	MOW	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Obat Vagina	
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Kesehatan / BP3AKB

s. Usia perkawinan pertama

Jenis data ini menggambarkan rata-rata usia perkawinan yang pertama. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

**Tabel 19.
Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Kota Bekasi
Tahun**

No	Kecamatan	Rata-rata Usia Pada Saat Perkawinan Pertama	
		L	P
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

No	Kecamatan	Rata-rata Usia Pada Saat Perkawinan Pertama	
		L	P
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
	Jumlah thn x		
	Jumlah thn x-1		
	Jumlah thn x-2		
	Jumlah thn x-3		
	Jumlah thn x-4		
	Jumlah thn x-5		

Sumber: Badan Pusat Statistik/Kantor Depag

t. Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Jenis data ini menggambarkan jumlah pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 20.
Jumlah Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
Kota Bekasi Tahun

No	Puskesmas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

No	Puskesmas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Kepolisian Resort (Polres)

2. Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indeks untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar diperoleh dari jumlah murid sesuai dengan jenjang pendidikannya dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan dikalikan seratus persen.

Formula :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah murid Sesuai jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah masing-masing jenjang pendidikan}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Kasar dihitung setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian ada tiga data APK, yaitu APK SD, APK SLTP dan APK SLTA. Dengan mengetahui angka APK, akan diketahui persentase penduduk yang seharusnya sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak sekolah. APK dapat digunakan bagi perencanaan pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Peningkatan APK akan berarti peningkatan lama sekolah penduduk. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 21.
Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	APK SD (%)			APK SMP (%)			APK SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

No	Kecamatan	APK SD (%)			APK SMP (%)			APK SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Pendidikan

b. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indeks untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Murni diperoleh dari jumlah murid sesuai kelompok usia pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan dikalikan seratus persen.

Formula:

$$\boxed{\text{APM}} = \frac{\text{Jumlah murid dgn usia sesuai jenjang pendidikan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah masing-masing jenjang}} \times 100\%$$

Angka Partisipasi Murni merupakan indeks yang lebih “halus” dibandingkan dengan APK karena yang diperbandingkan setara yaitu sesuai dengan jenjang usia masing-masing. APM dihitung setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian ada tiga data APM, yaitu APM SD, APM SLTP dan APM SLTA. Dengan mengetahui angka APM akan diketahui persentase penduduk yang seharusnya sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak sekolah. APM dapat digunakan bagi perencanaan pembangunan bidang pendidikan untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Peningkatan APM akan berarti peningkatan lama sekolah penduduk. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 22.
Angka Partisipasi Murni Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	APM SD (%)			APM SMP (%)			APM SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									

No	Kecamatan	APM SD (%)			APM SMP (%)			APM SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Pendidikan

c. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA

Angka Putus Sekolah adalah indeks untuk mengukur tingkat putus sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Angka Putus Sekolah diperoleh dari jumlah murid yang putus sekolah dibagi jumlah siswa masing-masing jenjang pendidikan dikalikan seratus persen.

Formula:

Angka Putus Sekolah	=	$\frac{\text{Jumlah murid yang putus sekolah}}{\text{Jumlah Siswa}} \times 100\%$
----------------------------	---	---

Angka Putus Sekolah dihitung setiap jenjang pendidikan. Dengan demikian ada tiga data Angka Putus Sekolah, yaitu Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SLTP dan Angka Putus Sekolah SLTA. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 23.
Angka Putus Sekolah Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Angka Putus Sekolah SD (%)			Angka Putus Sekolah SMP (%)			Angka Putus Sekolah SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Pendidikan

d. Angka Melanjutkan menurut jenjang pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Angka melanjutkan menunjukkan persentase jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Angka melanjutkan diperoleh dari jumlah siswa yang masuk pada jenjang pendidikan lebih tinggi dibagi jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan sebelumnya dibagi dikalikan seratus persen.

Formula:

$$\text{AM SD ke SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\text{AM SD ke SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$$

Angka Melanjutkan terdiri dari Angka melanjutkan dari jenjang SD ke SMP, dan dari jenjang SMP ke SMA. Dengan demikian ada tiga data Angka Putus Sekolah, yaitu Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SLTP dan Angka Putus Sekolah SLTA. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 24.
Angka Melanjutkan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP (%)			Angka Putus Sekolah dari SMP ke SMA (%)		
		L	P	Total	L	P	Total
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
	Jumlah thn x						
	Jumlah thn x-1						
	Jumlah thn x-2						
	Jumlah thn x-3						
	Jumlah thn x-4						
	Jumlah thn x-5						

Sumber: Dinas Pendidikan

e. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Angka melek huruf digunakan salah satunya untuk mengukur IPM, selain itu angka melek huruf juga digunakan untuk

mengetahui jumlah penduduk yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin pada usia tersebut. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 25.
Angka Melek Huruf Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Usia Harapan Hidup (tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah thn x			
2.	Jumlah thn x-1			
3.	Jumlah thn x-2			
4.	Jumlah thn x-3			
5.	Jumlah thn x-4			
6.	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik

f. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Pendidikan S1/D-IV menjadi syarat minimal pendidikan yang harus ditempuh oleh guru sebagai pendidik. Persentase pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Formula: } \frac{\text{Jumlah guru berjasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$$

Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 26.
Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Guru Berijasah S1/D-IV		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			

No	Kecamatan	Jumlah Guru Berijasah S1/D-IV		
		L	P	Total
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Pendidikan

g. Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan

Jenis data ini menggambarkan jumlah peserta pendidikan kesetaraan, meliputi Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 27.
Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Paket A (orang)			Paket B (orang)			Paket C (orang)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									

Sumber: Dinas Pendidikan

h. Persentase Siswa Tidak Lulus yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan

Jenis data ini menggambarkan persentase siswa tidak lulus yang mengikuti pendidikan kesetaraan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 28.
Persentase Siswa Tidak Lulus yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan
Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Paket A (%)			Paket B (%)			Paket C (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										

No	Kecamatan	Paket A (%)			Paket B (%)			Paket C (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Pendidikan

i. Persentase Anak Putus Sekolah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan

Jenis data ini menggambarkan persentase siswa putus sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 29.
Persentase Anak Putus Sekolah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan
Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Paket A (%)			Paket B (%)			Paket C (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Dinas Pendidikan

j. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jenis data ini menggambarkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 30.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kota Bekasi Tahun

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Pendidikan

k. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Jenis data ini menggambarkan jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 31.
Jumlah Penduduk menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Tidak/Belum Pernah Sekolah			Tidak/belum Tamat SD/MI			Lulus SD/MI			Lulus SMP/MTs			Lulus SMA/MA/SMK			Lulus Diploma			Lulus S1/S2/S3		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
	Jumlah thn x																					
	Jumlah thn x-1																					
	Jumlah thn x-2																					
	Jumlah thn x-3																					
	Jumlah thn x-4																					
	Jumlah thn x-5																					

Sumber: Badan Pusat Statistik

l. Rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk adalah angka rata-rata dari jumlah lama sekolah masing-masing jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 32.
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bekasi
Tahun

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	L	P	Total
thn x			
thn x-1			
thn x-2			
thn x-3			
thn x-4			
thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik

m. Jumlah pelanggan saluran telepon

Jenis data ini menggambarkan jumlah pelanggan saluran telepon. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 33.
Jumlah Pelanggan Saluran Telepon Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pelanggan Saluran Telepon		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Jenis data ini menggambarkan persentase antara jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 34.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)			Jumlah Angkatan Kerja			TPAK (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta menggambarkan besarnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan di sektor swasta. Data partisipasi perempuan di lembaga swasta dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:

$$\text{Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta} = \frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$$

Tabel 35.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta	Jumlah Pekerja Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga swasta (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

c. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menggambarkan besarnya partisipasi perempuan dalam pekerjaan di lembaga pemerintah. Data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:

$$\text{Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah} = \frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$$

Tabel 36.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Di Kota Bekasi Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)
1.				
2.				

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

d. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Jumlah pekerja dibawah umur menggambarkan banyaknya pekerja yang masih berusia anak-anak. Data persentase pekerja dibawah umur dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Formula:

$$\text{Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur} = \frac{\text{Pekerja anak usia 5-14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas}} \times 100$$

Tabel 37.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja anak usia 5-14 tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 tahun keatas	Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja anak usia 5-14 tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 tahun keatas	Persentase Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap untuk bekerja atau dipekerjakan dalam berbagai bidang kerja. Angkatan kerja meliputi angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Data tingkat pengangguran terbuka dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 38.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Angkatan Kerja			Angkatan kerja yang Bekerja			Pengangguran/ Mencari Pekerjan			TPT (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													

No	Kecamatan	Jumlah Angkatan Kerja			Angkatan kerja yang Bekerja			Pengangguran/ Mencari Pekerjaan			TPT (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
	Jumlah thn x												
	Jumlah thn x-1												
	Jumlah thn x-2												
	Jumlah thn x-3												
	Jumlah thn x-4												
	Jumlah thn x-5												

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

f. Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pencari kerja dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 39.
Pencari Kerja di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			

No	Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja		
		L	P	Total
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

g. Pencari kerja Menurut Pendidikan

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang mencari pekerjaan pada kurun waktu tertentu dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 40.
Jumlah Pencari Kerja Menurut Pendidikan
Kota Bekasi Tahun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja		
		L	P	Total
1.	SD			
2.	SMP			
3.	SMA			
4.	Diploma (DI, DII, DIII)			
5.	Sarjana (S1)			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

h. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan banyaknya pencari kerja yang telah ditempatkan dalam memperoleh pekerjaan. Pencari kerja yang ditempatkan dihitung dengan membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja, dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 41.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja			Jumlah Pencari Kerja yg Ditempatkan			% Pencari Kerja yg Ditempatkan		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										

No	Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja			Jumlah Pencari Kerja yg Ditempatkan			% Pencari Kerja yg Ditempatkan		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

i. Perkiraan tingkat daya beli

Tingkat daya beli masyarakat dapat diketahui dari pendapatan perkapita penduduk. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 42.
Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Daya Beli		
		L	P	Total
1.	thn x			
2.	thn x-1			
3.	thn x-2			
4.	thn x-3			
5.	thn x-4			
6.	thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik

j. Jumlah Keluarga miskin

Data ini menggambarkan banyaknya keluarga miskin dan persentasenya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 43.
Jumlah Keluarga Miskin di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Keluarga Miskin			Persentase Keluarga Miskin (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pusat Statistik/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat/ BP3AKB

k. Jumlah Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ini adalah penduduk yang bekerja di daerah lain dan melakukan pulang pergi seminggu sekali atau sebulan sekali ke tempat tinggalnya di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 44.
Jumlah Antar Kerja Antar Daerah Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah AKAD		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

No	Kecamatan	Jumlah AKAD		
		L	P	Total
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

1. Jumlah Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAD) ini adalah penduduk yang bekerja di negara lain. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 45.
Jumlah Antar Kerja Antar Negara Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah AKAN		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

m. Pekerja di sektor formal

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor formal. dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 46.
Jumlah Pekerja di Sektor Formal di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Formal		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

n. Pekerja di sektor informal

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 47.
Jumlah Pekerja di Sektor Informal di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Informal		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Informal		
		L	P	Total
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

o. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Data ini menggambarkan banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut pemiliknya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 48.
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

p. Keanggotaan Koperasi

Data ini menggambarkan jumlah anggota koperasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 49.
Jumlah Anggota Koperasi di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota Koperasi		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

q. Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Data ini menggambarkan banyaknya penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 50.
Jumlah Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Kota Bekasi Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Kredit/Pinjaman dari Lembaga Keuangan		
		L	P	Total
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

r. Pekerja tak dibayar (unpaid worker)

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja tak dibayar. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 51.
Jumlah Pekerja Tak Dibayar di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja tak dibayar (unpaid worker)		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

s. Pekerja profesional dan manajerial

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja profesional dan manajerial. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 52.
Jumlah Pekerja Profesional dan Managerial di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Profesional & Managerial		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

t. Pekerja menurut lapangan usaha

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja menurut lapangan usaha. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 53.
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi
Tahun

No	Lapangan usaha	Jumlah penduduk bekerja		
		L	P	Total
1.	Pertanian			
2.	Pertambangan/Penggalan			
3.	Industri			
4.	Listrik, Gas dan Air			
5.	Bangunan			
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran			
7.	Transportasi/Komunikasi			
8.	Keuangan			
9.	Jasa-jasa			

No	Lapangan usaha	Jumlah penduduk bekerja		
		L	P	Total
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pusat Statistik/Dinas Tenaga Kerja

u. Pekerja Peserta Jamsostek / K3

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 54.
Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek / K3		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja

v. Pekerja yang Terkena PHK

Data ini menggambarkan banyaknya pekerja yang terkena kasus PHK. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 55.
Jumlah Pekerja yang Terkena PHK di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja yang Terkena PHK		
		L	P	Total
1.				
2.				

No	Kecamatan	Jumlah Pekerja yang Terkena PHK		
		L	P	Total
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja

w. Jumlah Pemilik Los di Pasar

Data ini menggambarkan banyaknya pemilik los pasar di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 56.
Jumlah Pemilik Los di Pasar di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik Los di Pasar		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik Los di Pasar		
		L	P	Total
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

x. Jumlah Pemilik Warung

Data ini menggambarkan banyaknya pemilik warung di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 57.
Jumlah Pemilik Warung di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik Warung		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

y. Jumlah Pemilik Kios

Data ini menggambarkan banyaknya pemilik kios di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 58.
Jumlah Pemilik Kios di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik Kios		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

No	Kecamatan	Jumlah Pemilik Kios		
		L	P	Total
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

z. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, perikanan, kehutanan.

Data ini menggambarkan banyaknya petugas penyuluh lapangan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 59.
Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian, perikanan, kehutanan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan

aa. Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan

Data ini menggambarkan banyaknya anggota kelompok tani yang mencari pekerjaan pada kurun waktu tertentu. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 60.
Jumlah Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan
di Kota Bekasi Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Tanaman Pangan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-4			

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan

bb. Anggota Kelompok Tani Ternak

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota kelompok tani ternak. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 61.
Jumlah Anggota Kelompok Tani Ternak di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Ternak		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

No	Kecamatan	Jumlah Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Ternak		
		L	P	Total
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan

cc. Anggota Kelompok Tani Perikanan

Data ini menggambarkan banyaknya anggota kelompok tani perikanan di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 62.
Jumlah Anggota Kelompok Tani Perikanan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Perikanan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			

No	Kecamatan	Jumlah Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Perikanan		
		L	P	Total
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

dd. Anggota LMDH

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) pada kurun waktu tertentu. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 63.
Jumlah Anggota LMDH di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota LMDH		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan

ee. Anggota Kelompok Pengrajin

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota kelompok pengrajin pada kurun waktu tertentu. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 64.
Jumlah Anggota Kelompok Pengrajin di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota Kelompok Pengrajin		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

ff. Jumlah Wisatawan

Data ini menggambarkan banyaknya wisatawan pada tahun tertentu.
Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 65.
Jumlah Wisatawan di Kota Bekasi
Tahun

No	Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara			Jumlah Wisatawan Nusantara		
		L	P	Total	L	P	Total
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

No	Obyek Wisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara			Jumlah Wisatawan Nusantara		
		L	P	Total	L	P	Total
10.							
11.							
12.							
	Jumlah thn x						
	Jumlah thn x-1						
	Jumlah thn x-2						
	Jumlah thn x-3						
	Jumlah thn x-4						
	Jumlah thn x-5						

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata

1. Bidang Pemerintahan, Politik dan Pengambilan Keputusan

a. Kepemilikan KTP

Indikator ini menggambarkan banyaknya penduduk wajib KTP yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kepemilikan KTP dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase kepemilikan KTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100\%$$

Kepemilikan KTP ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 66.
Kepemilikan KTP di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP (>17 thn atau telah menikah)			Jumlah penduduk memiliki KTP			Persentase Penduduk Memiliki KTP (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP (>17 thn atau telah menikah)			Jumlah penduduk memiliki KTP			Persentase Penduduk Memiliki KTP (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

b. Kepemilikan akta kelahiran

Indikator ini menggambarkan banyaknya penduduk yang telah memiliki akte kelahiran. Kepemilikan Akte Kelahiran dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Persentase kepemilikan Akte Kelahiran =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Kepemilikan akte kelahiran ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 67.
Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP (>17 thn atau telah menikah)			Jumlah penduduk memiliki KTP			Persentase Penduduk Memiliki KTP (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP (>17 thn atau telah menikah)			Jumlah penduduk memiliki KTP			Persentase Penduduk Memiliki KTP (%)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

c. Partisipasi di Lembaga Legislatif

1. Anggota DPRD Provinsi

Data ini menggambarkan banyaknya penduduk yang menjadi anggota DPRD Provinsi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 68.
Jumlah Penduduk yang Menjadi Anggota DPRD Provinsi
Tahun

o	Tahun	Anggota DPRD		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			
	thn x-2			
	thn x-3			
	thn x-4			

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas

2. Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Data ini menggambarkan banyaknya penduduk yang menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 69.
Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi
Tahun

No	Nama Partai	Anggota DPRD Kabupaten/Kota		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

No	Nama Partai	Anggota DPRD Kabupaten/Kota		
		L	P	Total
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas/KPU

d. Partisipasi di Lembaga Yudikatif

1. Jumlah Jaksa

Data ini menggambarkan banyaknya jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 70.
Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Jumlah Jaksa		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			
	thn x-2			
	thn x-3			
	thn x-4			
	thn x-5			

Sumber: Kejaksaan Negeri

2. Hakim

Data ini menggambarkan banyaknya hakim di Kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 71.
Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Jumlah Hakim		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			
	thn x-2			

No	Tahun	Jumlah Hakim		
		L	P	Total
	thn x-3			
	thn x-4			
	thn x-5			

Sumber: Pengadilan Negeri

3. Polisi

Data ini menggambarkan banyaknya polisi di Polres Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 72.
Jumlah Polisi di Polres Bekasi
Tahun

No	Tahun	Jumlah Polisi		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			
	thn x-2			
	thn x-3			
	thn x-4			
	thn x-5			

Sumber: Kepolisian Resort (Polres)

e. Partisipasi di Lembaga Eksekutif

1) PNS menurut Jabatan Struktural

Data ini menggambarkan banyaknya PNS yang menjadi pejabat struktural. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 73.
Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural Kota Bekasi
Tahun

No	Jabatan Struktural	Jumlah PNS		
		L	P	Total
1.	Eselon I			
2.	Eselon II			
3.	Eselon III			
4.	Eselon IV			
	Jumlah 2011			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

2) PNS menurut Jabatan Fungsional

Data ini menggambarkan banyaknya PNS menurut jabatan fungsional. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 74.
Jumlah PNS Menurut Jabatan Fungsional Kota Bekasi
Tahun

No	Jabatan Fungsional	Jumlah PNS		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

3) PNS menurut Golongan

Data ini menggambarkan banyaknya PNS Kota Bekasi menurut golongan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 75.
Jumlah PNS Menurut Golongan di Kota Bekasi
Tahun

No	Golongan	Jumlah PNS		
		L	P	Total
1.	I			
2.	II			
3.	III			
4.	IV			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			

No	Golongan	Jumlah PNS		
		L	P	Total
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

4) Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

Data ini menggambarkan banyaknya PNS menurut tingkat pendidikannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 76.
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bekasi
Tahun

No	Dinas/ Instansi	Lulus SMP/MTs (%)			Lulus SMA/MA/SM K (%)			Lulus Diploma			Lulus S1/S2/S3			Jumlah		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
	Jumlah thn x															
	Jumlah thn x-1															
	Jumlah thn x-2															
	Jumlah thn x-3															
	Jumlah thn x-4															
	Jumlah thn x-5															

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

5) Jumlah Camat

Data ini menggambarkan banyaknya camat di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 77.
Jumlah Camat di Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Jumlah Camat		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			

No	Tahun	Jumlah Camat		
		L	P	Total
	thn x-2			
	thn x-3			
	thn x-4			
	thn x-5			

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda

6) Jumlah Kepala Desa/Lurah

Data ini menggambarkan banyaknya kepala desa/lurah di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 78.
Jumlah Kepala Desa/Lurah di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Kades/Lurah		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda

7) Keanggotaan Partai Politik

Data ini menggambarkan banyaknya anggota partai politik di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 79.
Jumlah Anggota Partai Politik di Kota Bekasi
Tahun

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota Partai Politik		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota Partai Politik		
		L	P	Total
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas

8) Pengurus Harian Parpol

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi pengurus harian partai politik. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 80.
Jumlah Pengurus Harian Partai Politik di Kota Bekasi
Tahun

No	Nama Partai Politik	Jumlah Pengurus Harian Parpol		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas

9) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 81.
Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa
di Kota Bekasi Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota BPD		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda

10) LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 82.
Jumlah Anggota LKMD di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota LKMD		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

No	Kecamatan	Jumlah Anggota LKMD		
		L	P	Total
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda

11) Serikat Pekerja

Data ini menggambarkan banyaknya orang yang menjadi anggota Serikat Pekerja. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 83.
Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Anggota Serikat Pekerja		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

2. Bidang Hukum dan Sosial-Budaya

a. Jumlah Narapidana Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)

Data ini menggambarkan banyaknya Narapidana yang menghuni Rumah tahanan Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 84.
Jumlah Narapidana Penghuni Rumah Tahanan di Kota Bekasi
Tahun

No	Jenis Kasus	Jumlah Penghuni Rutan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Rumah Tahanan Kota Bekasi

b. Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Data ini menggambarkan banyaknya Lanjut Usia di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 85.
Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Lanjut Usia		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber : Dinas Sosial

c. Penyandang Cacat (Penca)

Data ini menggambarkan banyaknya penyandang cacat yang terdapat di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 86.
Jumlah Penyandang Cacat di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Cacat		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Cacat		
		L	P	Total
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber : Dinas Sosial

d. Penca menurut pendidikan yang ditamatkan

Data ini menggambarkan banyaknya penyandang cacat berdasarkan tingkat pendidikannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 87.
Jumlah Penyandang Cacat Menurut Pendidikan yang ditamatkan
Kota Bekasi Tahun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penyandang Cacat		
		L	P	Total
1.	SD			
2.	SMP			
3.	SMA			
4.	Diploma (DI, DII, DIII)			
5.	Sarjana (S1)			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber : Dinas Sosial

e. Pengungsi akibat konflik/bencana

Data ini menggambarkan banyaknya pengungsi akibat konflik/bencana. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 88.
Jumlah Pengungsi Akibat Konflik/Bencana Kota Bekasi
Tahun

No	Tahun	Jumlah Penyandang Cacat		
		L	P	Total
	thn x			
	thn x-1			
	thn x-2			
	thn x-3			

No	Tahun	Jumlah Penyandang Cacat		
		L	P	Total
	thn x-4			
	thn x-5			

Sumber: Dinas Sosial

3. Bidang Kekerasan terhadap Perempuan

a. Jumlah Korban Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya korban kekerasan di Kota Bekasi.

Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 89.
Jumlah Korban Kekerasan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Anak (0<18 Tahun)			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

b. Tingkat Pendidikan Korban Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya korban kekerasan berdasarkan tingkat pendidikannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 90.
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Bekasi Tahun

No	Tingkat Pendidikan	Anak (0<18 Tahun			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Tidak sekolah									
2.	SD/MI									
3.	SMP/MTs									
4.	SMA/SMK/MA									
5.	Diploma (DI-DIII)									
6.	Sarjana (S1) keatas									
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

c. Status Pekerjaan Korban Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya korban kekerasan berdasarkan status pekerjaan korban kekerasan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 91.
Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Status Pekerjaan
Di Kota Bekasi Tahun

No	Status Pekerjaan	Anak (0<18 Tahun			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Bekerja									
2.	Pengangguran									
3.	Mengurus rumah tangga									
4.	Sekolah									
5.	Belum sekolah									
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

d. Status Perkawinan Korban Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya jumlah korban kekerasan berdasarkan status perkawinannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 92.
Jumlah Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan
di Kota Bekasi Tahun

No	Status Perkawinan	Anak (0<18 Tahun			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Menikah									
2.	Cerai (janda/duda)									
3.	Belum menikah									
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

e. Jenis Kekerasan terhadap Korban Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya korban kekerasan berdasarkan jenis kekerasan. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 93.
Jumlah Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan
Di Kota Bekasi Tahun

No	Jenis Kekerasan	Anak (0<18 Tahun			Remaja (18-<25 Tahun)			Dewasa (25 Tahun ke atas)		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1.	Fisik/KDRT									
2.	Seksual									
3.	Psikis									
4.	Trafiking									
5.	Ekonomi									
	Jumlah 2011									
	Jumlah thn x									
	Jumlah thn x-1									
	Jumlah thn x-2									
	Jumlah thn x-3									
	Jumlah thn x-4									
	Jumlah thn x-5									

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

f. Jumlah Pelaku Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya pelaku tindak kekerasan di Kota Bekasi. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 94.
Jumlah Pelaku Kekerasan di Kota Bekasi
Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Kekerasan		
		L	P	Total
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

g. Tingkat Pendidikan Pelaku Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya jumlah pelaku kekerasan berdasarkan tingkat pendidikannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 95.
Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kota Bekasi Tahun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pelaku Kekerasan		
		L	P	Total
1.	Tidak sekolah			
2.	SD/MI			
3.	SMP/MTs			
4.	SMA/SMK/MA			
5.	Diploma (DI-DIII)			
6.	Sarjana (S1) keatas			

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pelaku Kekerasan		
		L	P	Total
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

h. Status Pekerjaan Pelaku Kekerasan

Data ini menggambarkan banyaknya pelaku kekerasan berdasarkan status pekerjaannya. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 96.
Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan Pelaku Kekerasan di Kota Bekasi Tahun

No	Status Pekerjaan	Jumlah Pelaku Kekerasan		
		L	P	Total
1.	Bekerja			
2.	Pengangguran			
3.	Mengurus rumah tangga			
4.	Sekolah			
5.	Belum sekolah			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

i. Hubungan Pelaku dengan Korban

Data ini menggambarkan banyaknya pelaku korban kekerasan berdasarkan hubungan pelaku dengan korban. Data ini dikumpulkan menggunakan tabel berikut:

Tabel 97.
Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Pelaku dengan Korban di Kota Bekasi Tahun

No	Status Pekerjaan	Pelaku		
		L	P	Total
1.	Suami/Istri			
2.	Keluarga/kerabat			
3.	Tetangga			
4.	Pacar			

No	Status Pekerjaan	Pelaku		
		L	P	Total
5.	Teman			
6.	Orang lain			
	Jumlah thn x			
	Jumlah thn x-1			
	Jumlah thn x-2			
	Jumlah thn x-3			
	Jumlah thn x-4			
	Jumlah thn x-5			

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Bagian 4.

P E N U T U P

Panduan data gender ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan dan menyajikan data pilah gender. Seperti kita ketahui, data pilah gender ini sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat di Kota Bekasi. Buku panduan ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam melakukan pengumpulan dan penyediaan data gender sesuai dengan tugas pokok masing-masing SKPD.

Diperlukan komitmen dan dukungan untuk dapat mengupayakan penyediaan data gender sesuai dengan buku panduan pengumpulan data gender ini. Hasil pengumpulan data gender menggunakan panduan data pilah gender ini nantinya dapat digunakan masing-masing SKPD dan segenap pelaku pembangunan di Kota Bekasi dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan daerah Kota Bekasi yang responsif gender. Harapannya dengan analisis gender menggunakan data gender yang akurat akan dihasilkan rencana kegiatan secara tepat sasaran yang mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Bekasi.

Harapan kami, panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman pengumpulan data gender Kota Bekasi secara periodik, dan dikembangkan sesuai kebutuhan. Semoga kesetaraan dan keadilan gender di Kota Bekasi dapat segera terwujud.